

ANALISA

1978 - 3

PANCASILA

Arti dan Penerapannya



ANALISA

Diterbitkan oleh CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS) sebagai terbitan berkala yang menyajikan analisa-analisa peristiwa dan masalah internasional dan nasional, baik ideologi dan politik maupun ekonomi, sosial budaya dan pertahanan serta keamanan, yang ditulis oleh Staff CSIS. Tetapi ANALISA juga menerima tulisan-tulisan dari luar CSIS dan menyediakan honoraria bagi karangan-karangan yang dimuat. Tulisan-tulisan dalam ANALISA tidak selalu mencerminkan pandangan CSIS.

Pemimpin Redaksi/

Penanggung jawab : Kirdi DIPOYUDO

Dewan Redaksi

Daoed JOESOEF, Rufinus LAHUR,
J. PANGLAYKIM, A.M.W. PRANARKA,
M. Hadi SOESASTRO, Harry TJAN SILA-
LAHI dan Jusuf WANANDI

Redaksi Pelaksana : Kirdi DIPOYUDO, Rufinus LAHUR

Harga per eks : Rp. 700,—

Harga langganan 1 tahun (12 nomor) : Rp. 8.000,— (bayar di muka)

CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES
Jalan Tanah Abang III/27, Jakarta Pusat, Telp. 356532 — 35

PENGANTAR REDAKSI	165
<i>Kirdi DIPOYUDO,</i> NEGARA DAN IDEOLOGI NEGARA - SUATU PENGANTAR	167
<i>Kirdi DIPOYUDO,</i> PANCASILA DASAR NEGARA DAN PANDANGAN HIDUP BANGSA INDONESIA	179
<i>Kirdi DIPOYUDO,</i> PANCASILA MORAL BANGSA INDONESIA - SUATU PENGANTAR	203
<i>Christianto WIBISONO,</i> MENUJU SISTEM EKONOMI PANCASILA	215
DAFTAR PUBLIKASI CSIS	241

PENGANTAR REDAKSI

Bagi Bangsa dan Negara Indonesia Pancasila adalah sangat penting karena merupakan pandangan hidup Bangsa yang telah dimurnikan dan dipadatkan menjadi dasar Negara Indonesia. Dengan demikian Pancasila adalah sumber tertib sosial dan seluruh kehidupan Bangsa Indonesia maupun sumber tertib negara dan tertib hukumnya. Akan tetapi dia tidak berguna dan tidak ada artinya apabila tidak dilaksanakan dalam kehidupan Bangsa maupun Negara. "Pancasila sama sekali bukan sekedar semboyan untuk dikumandangkan, juga bukan dasar falsafah Negara yang sekedar dikeramatkan dalam dokumen Pembukaan UUD, melainkan harus diamalkan", demikian Pejabat Presiden Soeharto pada Peringatan Hari Lahirnya Pancasila 1 Juni 1967. Sehubungan dengan itu diharapkan agar Pancasila semakin diselami artinya bagi kehidupan sehari-hari negara maupun masyarakat. Kita berkeyakinan bahwa keampuhan suatu ideologi seperti Pancasila sangat ditentukan oleh meratanya kadar pengetahuan yang semakin mendalam terhadapnya serta oleh kemampuan dan kesanggupan semua warganegara sebagai pengemban ideologi itu untuk menghayati dan melaksanakannya di pelbagai bidang kehidupan.

Dalam rangka itu ANALISA mengajak khalayak ramai, khususnya para cendekiawan, untuk bersama-sama mempelajari Pancasila dan menyelami artinya sebagai dasar falsafah negara maupun pandangan hidup bangsa agar kita menjadi semakin mampu menghayati dan melaksanakannya dalam menghadapi tantangan-tantangan dari tingkat perkembangan kita sebagai bangsa sekarang ini di pelbagai bidang. Untuk itu Kirdi DIPOYUDO menurunkan suatu pengantar dalam tiga karangan. Yang pertama berjudul "Negara dan Ideologi Negara", yang kedua "Pancasila Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia", dan yang ketiga "Pancasila Moral Bangsa Indonesia". Yang pertama berusaha membahas hakikat, tujuan dan

tugas negara serta peranan ideologi di dalamnya. Yang kedua mencoba menyelami arti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Sedangkan yang ketiga berusaha menjelaskan bahwa pada hakikatnya Pancasila adalah satu kesatuan bulat azas-azas budi pekerti atau moral, yang dengan tepat disebut moral Bangsa Indonesia atau moral Pancasila untuk membedakannya dari moral-moral lain. Ketiga karangan bermaksud mengulas persoalan-persoalannya terutama dari segi Filsafat Sosial dan Filsafat Politik, dan oleh sebab itu lebih bersifat normatif dari pada deskriptif.

Sebagai dasar falsafah Negara, Pancasila adalah sumber tertib negara dan sumber tertib hukumnya yang mengatur segala bidang kehidupan negara, dan secara demikian menjadi jiwa bidang-bidang politik, perekonomian, sosial budaya dan lain sebagainya. Asas-asas yang terkandung di dalamnya harus dijabarkan lebih lanjut dan dilaksanakan dalam bidang-bidang itu. Maka akan terwujud politik Pancasila, perekonomian Pancasila, pendidikan Pancasila, perburuhan Pancasila dan sebagainya. Dengan karangannya "Menuju Ekonomi Pancasila" Christianto WIBISONO berusaha menerapkan Pancasila pada bidang ekonomi.

Proses perkembangan bangsa akhir-akhir ini dengan rangkaian pembangunannya yang terus berlangsung pada dirinya juga merupakan suatu tantangan yang tidak kalah bobotnya jika dibandingkan dengan situasi-situasi kritis yang di masa lampau mendorong kita untuk membahas dan mendalami Pancasila. Mudah-mudahan tantangan ini juga mengilhami kita semua untuk semakin baik mempelajari Pancasila dalam rangka penghayatan dan pelaksanaannya di pelbagai bidang kehidupan.

Maret 1978

REDAKSI

NEGARA DAN IDEOLOGI NEGARA — SUATU PENGANTAR

Kirdi DIPOYUDO

Dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai dasar Negara ditetapkan Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan dan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian Pancasila menjadi ideologi negara Indonesia. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang arti Pancasila sebagai ideologi Negara itu, adalah bermanfaat untuk membahas perlunya negara bagi manusia, hakikat dan tujuan negara, tugas subsidier dan kompetensinya. Selain itu perlu juga dibahas arti ideologi dan perlunya bagi negara.

PERLUNYA NEGARA BAGI MANUSIA

Sebagai makhluk jasmani dan rohani, yang diperlengkapi dengan akal budi dan kehendak merdeka, manusia sejak lahirnya adalah suatu pribadi, tetapi pribadi ini mula-mula lebih merupakan potensi, yang harus berkembang terus menerus untuk menjadi pribadi yang sempurna dan mencapai tujuan eksistensinya. Itulah panggilan dan tugas manusia. Sehubungan dengan itu dia diberi hak-hak asasi, yaitu hak-hak manusia sebagai manusia. Dia tidak hanya berhak menggunakan hak-haknya itu, tetapi juga wajib menggunakannya karena hanya secara demikian dia dapat mengemban tugas hidupnya dan mencapai tujuan eksistensinya.

Untuk mencapai perkembangan pribadinya yang wajar dan mewujudkan kesejahteraan insani sepenuhnya (vol menselijk welzijn), manusia tidak mencukupi dirinya sendiri melainkan memerlukan sesamanya. Hal itu berarti bahwa manusia harus saling membantu dan saling melengkapi. Oleh sebab itu manusia wajib dan juga berhak untuk hidup dalam hubungan, pergaulan dan kerjasama dengan sesamanya, baik secara lepas maupun secara tetap dalam ikatan-ikatan yang permanen. Hal itu ditandaskan dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi PBB : "Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat dan hanya di situ dia dapat mengembangkan pribadinya secara merdeka dan penuh."¹

Oleh sebab itu manusia sebagai suatu keharusan membentuk bermacam-macam kesatuan sosial atau masyarakat (society atau community). Pria dan wanita menikah dan membentuk keluarga, yaitu kesatuan sosial dasar yang paling kecil. "Keluarga adalah kesatuan kelompok yang alamiah dan dasar", demikian pasal 16 ayat 3 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi tersebut. Orang mendirikan desa, kota, propinsi, perkumpulan dagang, olah raga, kesenian dan lain sebagainya.

Akan tetapi keluarga dan lain-lain kesatuan sosial yang bersumber pada kemauan bebas manusia untuk hidup bersama dan bekerjasama, belum dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya selengkapya. Maka pada tingkat perkembangan tertentu manusia memerlukan kesatuan sosial yang lebih besar, yang mampu menangani segala urusan bersama untuk menjamin kesejahteraan umum dalam arti kesejahteraan manusia yang lengkap bagi semua anggotanya.² Kesatuan sosial serupa itu adalah negara. Orang-orang Romawi kuno menyebutnya Res Publica, artinya urusan atau kepentingan publik. Sejumlah orang bergabung dan membentuk negara untuk menjamin kesejahteraan umum, yang tidak dapat diwujudkan oleh mereka masing-masing maupun kesatuan-kesatuan sosial yang lebih

1 Disalin dari Ian Brownlie, Ed., *Basic Documents on Human Rights* (Oxford, 1971), hal. 107

2 Mengenai perlunya negara bagi manusia lebih lanjut lihat J.D. Mabbott, *The State and the Citizen* (London, 1970), hal. 97-107; dan Eberhard Welty, *A Handbook of Christian Social Ethics*, II (London, 1963), hal. 198-199

kecil dan terbatas ruang lingkup serta jangkauannya. Dengan demikian negara adalah suatu keharusan dalam arti bahwa manusia harus membentuk negara dan hidup sebagai warganya.

HAKIKAT DAN TUJUAN NEGARA

Oleh sebab itu negara kiranya dapat dibatasi sebagai suatu kesatuan sosial atau organisasi yang mengatur dan menertibkan hubungan-hubungan antara para warganya dengan kekuasaan demi tercapainya kesejahteraan umum. Yang dimaksud dengan organisasi ialah sekelompok orang yang dengan pembagian tugas dan kerjasama mengejar suatu tujuan bersama. Lewat pembagian tugas itu setiap anggotanya mempunyai tugas tertentu dalam rangka keseluruhan, yang biasa disebut fungsi. Kerjasama demi tercapainya tujuan bersama itu pertama-tama dijamin dengan adanya pembagian tugas yang jelas dan terarah pada tujuan bersama itu, dan kedua dengan adanya pimpinan yang memberikan bimbingan, melakukan koordinasi kegiatan-kegiatan para anggota dan mengadakan pengawasan agar segala sesuatu berjalan dengan baik dan masing-masing anggota mendapatkan bagian yang wajar dalam beban dan hasil usaha bersama. Setiap organisasi mempunyai pucuk pimpinan yang diserahkan kepada seorang atau sekelompok petugas tertinggi. Dalam organisasi negara pucuk pimpinan itu adalah pemerintah dalam arti yang luas. Tugasnya ialah mengatur agar organisasi dengan bagian-bagiannya berjalan dengan lancar dan mengejar tujuannya dengan cara yang tepat dan efisien.

Selanjutnya negara mengatur dan menertibkan hubungan-hubungan antara para warganya dengan kekuasaan. Negara adalah suatu organisasi kekuasaan dan masyarakat yang bersangkutan adalah masyarakat kekuasaan (*gezagsgemeenschap*). Untuk menjamin tercapainya kesejahteraan umum, negara dapat memaksa para warganya, yaitu menggunakan kekerasan fisik sejauh perlu, agar peraturan-peraturan dan keputusan-keputusannya dilaksanakan. ¹

¹ Lihat J.H.A. Logemann, *Het Staats-recht Van Indonesie* ('s-Gravenhage - Bandung, 1955), hal. 17-18

Akan tetapi negara bukanlah tujuan. Seperti kesatuan-kesatuan sosial lain, negara adalah untuk kepentingan para warganya. Tujuan negara sudah barang tentu lebih dari pada kepentingan-kepentingan para warganya dalam arti bahwa tujuannya itu ialah kesejahteraan umum seluruh bangsa. Namun bukanlah undang-undang, lembaga-lembaga, kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang menjadi titik tolak dan tujuan negara, melainkan manusia dengan martabatnya, tujuan-tujuannya, kebutuhan-kebutuhan dan tugas-tugasnya. Tiada kesejahteraan umum selain kesejahteraan lengkap orang-orang. Memajukan kesejahteraan umum tak lain ialah memajukan perkembangan orang-orang itu dan meningkatkan harkat mereka. Negara mengusahakan kondisi baik yang diperlukan para warganya untuk mewujudkan perkembangan diri dan bakat-bakat mereka sepenuh mungkin.¹

Unsur-unsur kesejahteraan umum itu di satu pihak ialah dihormatinya hak-hak orang-orang atau kepastian hukum dan di lain pihak tersedianya barang-barang dan jasa-jasa kebutuhan hidup bagi semua anggota masyarakat dan negara atau kemakmuran umum (*public prosperity*). Dalam rangka itu negara harus menegakkan hukum dan keadilan di satu pihak dan menjamin agar barang-barang dan jasa-jasa tersebut tersedia bagi semua di lain pihak.

TUGAS SUBSIDIER NEGARA

Seperti kita lihat di atas, negara bukanlah tujuan tetapi sebagai kesatuan pribadi-pribadi dia adalah sarana untuk membantu para warganya dan melengkapi mereka dengan hal-hal yang tidak dapat diusahakan oleh mereka masing-masing secara sewajarnya. Negara adalah untuk mengabdikan pada kepentingan rakyat. Akan tetapi juga bukan tugas negara untuk menangani segala urusan rakyat, sehingga rakyat tidak perlu berbuat sesuatu dan menantikan segala sesuatu dari negara. Tugas negara adalah subsidier, memberikan subsidi atau bantuan kepada orang-orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri sewajarnya. Apa yang

¹ Lihat Ernest Barker, *Principles of Social and Political Theory* (Oxford, 1967), hal. 47, 123, 132; lihat juga Jacques Maritain, *Man and the State* (Chicago-London, 1971) hal. 12-13

dapat dikerjakan oleh orang-orang dan kesatuan-kesatuan sosial yang lebih kecil seperti keluarga, masyarakat desa, perusahaan perusahaan swasta dan lain sebagainya tidak perlu ditangani oleh negara. Tugas negara adalah sekedar membantu dan melengkapi berbagai kekuarangan orang-orang dan kelompok-kelompok yang lebih kecil tersebut.

Antara lain negara melakukan tugas subsidiernya dengan merangsang kegiatan-kegiatan rakyat, mengusahakan keseimbangan dan koordinasi antara golongan-golongan, memberikan penyuluhan dan bimbingan, melakukan pengawasan dan lain sebagainya. Negara yang sehat memerlukan orang-orang dan kelompok-kelompok yang mampu bertindak dan berusaha atas daya kreasi dan prakarsa mereka sendiri. Oleh sebab itu tugas utama negara ialah merangsang dan membina para warganya agar mengembangkan diri dan potensi-potensi mereka. Bantuan yang diberikan hendaknya pertama tama bertujuan untuk memungkinkan para warganegara lambat laun menolong diri sendiri dan berdiri atas kaki sendiri. Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln pernah melukiskan tugas subsidier negara itu sebagai berikut : "Sasaran legitim pemerintah ialah melakukan bagi masyarakat barang apa harus dilakukan tetapi masyarakat tidak dapat melakukannya sama sekali atau tidak sebaik itu dengan kemampuan orang masing-masing. Dalam segala sesuatu yang dapat dilakukan orang masing-masing, pemerintah tidak boleh turun tangan".¹

Berdasarkan peranan subsidier negara itu terdapat banyak perbedaan dalam realisasi tujuan negara. Peranan negara itu dapat besar dapat kecil sesuai dengan kemampuan rakyat masing-masing. Apabila rakyat telah maju dan mampu mengembangkan kehidupannya dalam bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, dan lain-lain, peranan negara akan berkurang, sedangkan di negara muda yang sedang berkembang peranan itu biasanya besar.

¹ Roy P. Basler, Ed., *Abraham Lincoln: His Speeches and Writings* (Nes York, 1946)

KOMPETENSI NEGARA

Dari hakikat, tujuan dan tugas negara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa negara tidak mahakuasa tetapi terbatas kekuasaan dan kompetensinya, yaitu terbatas pada pelaksanaan tugasnya. Seperti diuraikan di atas, negara dimaksud untuk memajukan kesejahteraan umum baik materiil maupun spirituil yang bersifat temporal bagi seluruh rakyat. Negara adalah untuk melayani para warganya dengan menjamin agar semua dapat menikmati hak-hak mereka dengan aman (tegaknya hukum dan keadilan), termasuk hak mereka untuk mendapatkan barang-barang dan jasa-jasa kebutuhan hidup seperlunya, sehingga mereka dapat mengembangkan diri serta potensi-potensi mereka dan mewujudkan kesejahteraan lahir batin mereka. Dia menjalankan tugasnya itu terutama dengan menciptakan kondisi dan tertib di mana semuanya itu mungkin.¹

Kekuasaan negara dimaksud untuk mengatur kekuatan-kekuatan sosial dan mengarahkan mereka pada kesejahteraan umum. Sebagai pelindung hak-hak para warganya, negara mempunyai kekuasaan penuh dan langsung. Dia dapat memaksa warganegara untuk menghormati hak-hak sesamanya dan memperbaiki pelanggaran-pelanggaran dengan memberikan restitusi atau menjalani hukuman. Sebagai promotor kesejahteraan umum, negara kekuasaannya hanyalah kondisionil, tidak langsung dan bersifat melengkapi. Oleh sebab itu dia tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak perlu atau tidak bermanfaat, yaitu sekiranya warga-warganya telah mampu melakukannya sendiri atau sekiranya tindakan negara tersebut akan melanggar hak-hak warganya. Dengan demikian negara dapat dan wajib mengadakan intervensi, tetapi hak ini dibatasi oleh asas subsidiaritas.

Dalam rangka itu negara membuat undang-undang dan melaksanakannya serta menghukum pelanggar-pelanggarnya. Selanjutnya dia menafsirkan undang-undang dan menuangkannya lebih lanjut dalam tindakan-tindakan kebijaksanaan. Undang-undang merupakan sarana utama negara untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam undang-undang itu negara

¹ Ernest Barker, *op. cit.*, hal. 117-123

membatasi secara terperinci hak-hak para warganya sebagai manusia dan warganegara, serta menetapkan mekanisme untuk menjamin agar hak-hak itu dihormati. Selain itu dalam undang-undang negara membatasi tindakan-tindakan yang harus dilakukan dan larangan-larangan demi kesejahteraan umum.¹ Negara dapat memaksakan (enforce) pelaksanaan undang-undangnya dengan menetapkan sanksi-sanksi dan menggunakan kekerasan untuk melaksanakannya. Tetapi justru karena itu kompetensinya terbatas. Negara hanya dapat menguasai tertib lahir yang mengatur tindakan-tindakan lahir (external acts) sejauh tindakan-tindakan ini menyangkut hak-hak dan kepentingan-kepentingan orang lain dan masyarakat. Batin atau hati manusia adalah di luar jangkauan dan kompetensinya. MacIver merumuskan kebenaran ini sebagai berikut : "Bukan saja karena sifat universalnya tetapi lebih karena paksaan sanksinya, undang-undang negara terbatas kompetensinya. Akar ketaatan pada undang-undang bukanlah paksaan tetapi kemauan untuk taat ; namun undang-undang mengambil bentuk suatu perintah. Oleh sebab itu dia hanya dapat mengatur tertib lahir masyarakat. Kekerasannya hanya dapat diterapkan pada segi lahir tingkah laku." ²

NEGARA DAN IDEOLOGI

Sebagai suatu organisasi kemasyarakatan, negara hanya dapat dikemudikan secara terarah dan efisien apabila ada gambaran jelas tentang hakikat, tujuan, dasar dan susunannya. Mereka yang bertugas menyusun undang-undang dasar yang akan menjadi landasan dan pedoman negara, harus mempunyai konsepsi dasar yang jelas tentang negara dan tujuannya serta tempat warganegara di dalamnya. Konsepsi dasar itu akan menjadi landasan dan pedoman bagi pembentukan struktur negara dan pelaksanaan tugas pemerintah dalam arti yang luas maupun sempit, bagi partisipasi rakyat, dan bagi kerjasama antara pemerintah sebagai pimpinan dan rakyat sebagai yang dipimpin. Dengan perkataan lain para pendiri negara dan penyusun konstitusinya harus mempunyai suatu ideologi negara sebagai dasar dan pedoman negara yang dibangun. Pendek kata,

¹ Lihat MacIver, *The Modern State* (London, 1966), hal. 364-375

² *Ibid.*, hal. 21

agar dapat berfungsi secara efisien negara harus mempunyai suatu ideologi.

Istilah ideologi mempunyai banyak arti, tetapi dalam hubungan ini yang dimaksud ialah kesatuan gagasan-gagasan dasar yang sistematis dan menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya baik individu maupun sosial, termasuk kehidupan negara. Penerapan ideologi di bidang kenegaraan adalah politik dan aliran ideologi menentukan arah politik. Selanjutnya ideologi bersifat azasi, sedangkan politik adalah suatu kebijaksanaan, yaitu pelaksanaan ideologi selaras dengan keadaan waktu dan tempat. Dengan demikian pada ideologi yang sama dapat bersumber pelbagai politik.

Ideologi menyatakan suatu cita-cita dan mencakup nilai-nilai yang menjadi dasar serta pedoman negara dan kehidupannya. Politik melaksanakan atau menerapkannya di negara tertentu yang berada di tempat tertentu dan dalam keadaan tertentu. Oleh sebab itu ideologi harus dibedakan dengan politik, tetapi keduanya terjalin satu sama lain secara erat. Jika ideologi disamakan dengan politik, maka norma-norma dasar yang menjadi landasan serta pedoman hidup kenegaraan akan diombang-ambingkan oleh keadaan. Sebaliknya jika politik disamakan dengan ideologi, maka politik akan macet dan tidak mempunyai dinamika serta gerak yang luwes untuk menghadapi masalah-masalah kemasyarakatan dan kenegaraan.¹

PANCASILA IDEOLOGI NEGARA INDONESIA

Sesuai dengan gagasan tersebut di atas, para cendekiawan dan pemimpin nasional Indonesia menjelang Proklamasi Kemerdekaan yang dianggap mewakili seluruh rakyat Indonesia menganggap sebagai salah satu tugas pokok mereka mencari dasar Indonesia Merdeka. Menurut Bung Karno yang dimaksud ialah suatu "philosophische grondslag" atau dasar falsafat, yaitu pikiran yang sedalam-dalamnya, untuk di atasnya didirikan Negara Indonesia. Setelah para anggota Badan Penyelidik

1 Lihat Ali Moertopo, *Akselerasi Modernisasi Pembangunan 25 Tahun* (Jakarta : CSIS, 1973), hal. 11-12; lihat juga Drs. Sukarna, *Ideologi. Suatu Studi Ilmu Politik* (Bandung, 1974), hal. 9-14

Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengemukakan pendapat-pendapat masing-masing, atas usul Bung Karno diputuskan bahwa Indonesia Merdeka akan dibangun atas lima sila yang disebut Pancasila.

Keputusan itu kemudian dikukuhkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang bertindak selaku wakil rakyat Indonesia. Hal itu terjadi pada 18 Agustus 1945, sehari sesudah Proklamasi Kemerdekaan, ketika Panitia di bawah pimpinan Bung Karno membicarakan rancangan UUD dan Pembukaannya yang telah disiapkan oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia tersebut. Setelah diadakan perubahan di sana sini, rancangan UUD dan Pembukaannya ditetapkan sebagai UUD dan Pembukaannya Negara Republik Indonesia, yang dinyatakan berlaku surut pada 17 Agustus 1945 dan selanjutnya dikenal sebagai UUD 1945 atau UUD Proklamasi.¹

Dalam Pembukaan UUD 1945 itu Pancasila dicantumkan sebagai dasar Negara Indonesia sebagai berikut : " maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. ²

Pembukaan UUD 1945 dan intinya Pancasila itu mempunyai hubungan erat dengan Proklamasi Kemerdekaan dan dengan Negara Proklamasi serta kelangsungannya. Negara Proklamasi adalah Negara Pancasila. Dalam Memorandum DPR-GR 9 Juni 1966 mengenai sumber tertib hukum Indonesia yang diterima baik oleh MPRS dengan Ketetapan No.

1 Lihat Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945*, Jilid 1, (Jakarta, 1971), hal. 145-475

2 Dikutip dari *Himpunan Ketetapan-ketetapan MPRS Disertai UUD 1945* (Jakarta : Pantjuran Tujuh 1969), hal. 254

XX/MPRS/1966 hal itu dirumuskan sebagai berikut : "Pembukaan UUD 1945 sebagai Pernyataan Kemerdekaan yang terperinci yang mengandung cita-cita luhur dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan yang memuat Pancasila sebagai Dasar Negara merupakan satu rangkaian dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan oleh sebab itu tidak dapat dirubah oleh siapa juga, termasuk MPR hasil an umum, yang berdasarkan pasal 3 UUD berwenang menetapkan dan merubah UUD, karena merubah isi Pembukaan berarti pembubaran Negara."¹

Penetapan Pancasila sebagai ideologi Negara Indonesia itu pertama-tama berarti bahwa Negara Indonesia dibangun atas dasar moral kodrati dan oleh sebab itu tunduk padanya dan wajib membela serta melaksanakannya baik dalam susunan maupun kehidupannya. Seperti diuraikan oleh Prof. Dr. Drijarkoro, Pancasila berakar pada kodrat manusia dan adalah inheren dalam eksistensi manusia sebagai manusia, sehingga dengan menganalisa kodrat manusia kita akan sampai juga pada Pancasila. Dengan demikian kelima sila Pancasila dapat dipandang sebagai rumusan kodrat manusia.² Dari kodrat manusia kelima sila itu disimpulkan sebagai norma agendi, sebagai pedoman untuk bertindak dan berbuat. Sesuai dengan dalil bahwa segala sesuatu harus bertindak menurut kodrat masing-masing, maka manusia harus bertindak menurut kodrat rasionil karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk jasmani-rohani yang berakal budi. Dengan perkataan lain manusia harus bertindak menurut akal sehatnya atau secara rasionil. Manusia adalah baik sebagai manusia apabila dia selalu bertindak secara rasionil. Dengan akal budinya manusia dapat mengenal kodratnya dan norma-norma yang mengikatnya sebagai manusia. Manusia yang mentaati norma-norma itu disebut baik, baik sebagai manusia atau baik dari segi moral (morally good). Norma-norma itu disebut moral kodrati (natural morals), karena dijabarkan dari kodrat manusia.³

1 *Ibid.*, hal. 50 ; lihat juga Prof. Notonagoro, *Beberapa Hal mengenai Falsafah Pancasila* (Jakarta : Pantjuran Tujuh, 1972), hal. 34

2 Lihat "Pancasila dan Religi" *Kumpulan Karangan* (Yogyakarta), hal. 133-162

3 Lebih lanjut lihat A.P. d'Entrevies, *Natural Law* (London, 1972), khususnya hal. 22-35; dan Ernest Barker, *op. cit.* hal. 98-101

MORAL DAN HUKUM DALAM NEGARA PANCASILA

Dengan demikian dalam Negara Pancasila hubungan antara moral kodrati dan hukum adalah sangat erat. Moral Pancasila dinyatakan sebagai cita-cita dan norma hukum negara. Oleh sebab itu norma-norma moral Pancasila menjadi azas-azas utama yang membimbing akal budi dalam membuat undang-undang yang mengatur negara dan tugas-tugasnya, lembaga-lembaga negara dan hubungan antara mereka, hubungan-hubungan dalam negara antara sesama warganegara, antara warganegara dan negara dan sebaliknya. Dengan demikian norma-norma moral itu menjadi ukuran undang-undang. Namun dalam hubungan ini harus dicatat, bahwa tidak semua norma moral dapat diundangkan. Hukum negara harus mengakui batas-batasnya, yaitu persetujuan rakyat dan kemungkinan pelaksanaan serta pemaksaannya (enforcement).

Pertama-tama harus diperhatikan wewenang rakyat dalam perundang-undangan. Undang-undang adalah ketetapan rakyat dalam arti bahwa perwakilan rakyat dan pemerintah mewajibkan atau melarang sesuatu dengan ancaman kekerasan fisik bagi pelanggar-pelanggarnya. Dalam menyusun undang-undang lembaga-lembaga legislatif harus selalu memperhatikan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum rakyat.

Selain itu harus diperhatikan kemungkinan pelaksanaan dan pemaksaannya. Tidak ada gunanya dan bahkan merugikan menyusun undang-undang yang di luar kemampuan rakyat, sehingga tidak dapat dilaksanakan. Undang-undang adalah untuk rakyat banyak dan dimaksud sebagai pedoman juridis bagi tindakan-tindakannya. Oleh sebab itu sasarannya tidak boleh terlalu tinggi, tetapi harus selalu diselaraskan dengan kemampuan rakyat untuk melaksanakannya. Undang-undang tidak dapat melarang semua kejahatan moral, tetapi hanya kejahatan yang berat dan membahayakan masyarakat seperti pembunuhan, pencurian, perampokan, penipuan, pemerasan, korupsi dan lain sebagainya. Tetapi di lain pihak lewat undang-undang negara dapat dan wajib memajukan pendidikan dan perbaikan moral rakyat secara berangsur-angsur sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan rakyat pada waktunya

yang tepat. Apa yang dua puluh tahun yang lalu belum dapat diundangkan kini mungkin sudah dapat, dan yang kini belum dapat sepuluh tahun lagi mungkin sudah. Seperti manusia, demikianpun bangsa mengalami perkembangan, juga dalam moralitasnya (public morality). Kenyataannya banyak hal yang dahulu hanya merupakan norma-norma moral kini telah juga menjadi norma-norma hukum, sehingga barang siapa melanggarnya dapat dijatuhi hukuman oleh negara. Misalnya perbudakan yang dahulu soal biasa kini telah dilarang di mana-mana. Demikianpun di banyak negeri menyewa anak-anak di bawah umur sebagai buruh.¹

PENUTUP

Agar dapat berfungsi secara efisien, suatu negara sebagai suatu kesatuan sosial yang terdiri atas orang-orang merdeka (persons) harus mempunyai suatu ideologi, yaitu satu kesatuan gagasan-gagasan dasar yang sistematis dan menyeluruh tentang manusia dan kehidupannya, baik individuil maupun sosial, termasuk negara. Khususnya harus jelas apakah hakikat dan tujuan negara serta hubungannya dengan para warganya.

Dengan memilih Pancasila sebagai ideologinya, Negara Indonesia berada dalam suatu kedudukan yang sangat baik untuk mengemban tugasnya dan mewujudkan tujuan-tujuannya. Pancasila mengandung jaminan-jaminan bahwa tujuan-tujuan negara akan dapat dicapai dengan baik asal benar-benar dilaksanakan. Pancasila bersumber pada kodrat manusia sebagai makhluk individuil dan sosial, dan merupakan pedoman-pedoman yang tepat bagi manusia dan negaranya. pada hakikatnya kelima sila Pancasila adalah satu kesatuan bulat azas-azas moral kodrati baik bagi tingkah laku perorangan maupun negara. Oleh sebab itu Pancasila harus dipertahankan. Akan tetapi hal itu belum cukup. Yang lebih penting, Pancasila harus dilaksanakan dalam segala bidang kehidupan negara dan dalam rangka itu semakin diselami, dipahami dan dihayati.

1 Lihat J.V. Dolan, "Natural Law and Legislation", *Laval Quarterly for Theology and Philosophy*, 16, (1960), hal. 237-264

PANCASILA DASAR NEGARA DAN PANDANGAN HIDUP BANGSA INDONESIA

Kirdi DIPOYUDO

Seperti ditandaskan dalam Memorandum DPR-GR 9 Juni 1966, yang disahkan oleh MPRS dengan ketetapan No. XX/MPRS/1966, Pancasila adalah pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan dipadatkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan atas nama Rakyat Indonesia menjadi dasar Negara Republik Indonesia. Hal ini dikukuhkan berulang kali oleh pimpinan Negara, terakhir dalam ketetapan MPR No. II/MPR/1978, yang juga menandakan bahwa untuk menjaga kelestarian dan kemampuannya demi terwujudnya tujuan-tujuan Nasional serta cita-cita Bangsa seperti terungkap dalam Pembukaan UUD 1945, Pancasila perlu dihayati dan diamalkan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara oleh setiap warganegara Indonesia, setiap penyelenggara Negara dan setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah. Karena "PANCASILA sama sekali bukan sekedar semboyan untuk dikumandangkan, PANCASILA bukan dasar falsafah Negara yang sekedar dikeramatkan dalam dokumen Pembukaan UUD; melainkan PANCASILA harus diamalkan. Tanpa diamalkan, apapun dasar falsafah yang kita pakai, apapun konsepsi yang kita buat, tidak akan berguna dan tidak ada artinya. Kita wajib mempertahankan PANCASILA, kita wajib melaksanakan PANCASILA, kita wajib mengisi kemerdekaan dengan mengamalkan PANCASILA oleh karena PANCASILA adalah dasar dan tujuan kemerdekaan ini.'

Demikian Pejabat Presiden Soeharto pada Peringatan Hari Lahirnya Pancasila di Jakarta, 1 Juni 1967.¹

Dalam rangka itu kita harus mempelajari Pancasila dan menyelami artinya sebagai dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa atau arti formilnya maupun arti sila masing-masing atau arti materiilnya. Dalam karangan ini kita akan membatasi diri dan hanya membahas arti formil Pancasila. Secara berturut-turut akan dibahas sifat-sifat Pancasila sebagai dasar falsafah negara, artinya sebagai dasar falsafah negara dan artinya sebagai pandangan hidup bangsa. Dalam pembahasan ini akan kita perhatikan bahwa pada hakikatnya Pancasila adalah budi pekerti atau moral.

I. PANCASILA DASAR FALSAFAH NEGARA

Dari sejarah terjadinya Pancasila sekitar Proklamasi Kemerdekaan diketahui bahwa Pancasila menurut rumusan yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 disetujui semua pihak sebagai dasar falsafah atau ideologi negara setelah dimusyawarahkan secara matang. Mufakat atau konsensus itu dicapai tidak hanya berkat kebesaran jiwa dan kesadaran yang mendalam akan perlunya persatuan bangsa, melainkan juga karena Pancasila itu memuat nilai-nilai luhur yang telah menjadi milik bersama Bangsa Indonesia dan merupakan suatu perpaduan yang baik antara ide-ide besarnya dan ide-ide besar dunia mengenai tata-negara dan hidup kenegaraan, yang mengandung jaminan-jaminan bahwa tujuan-tujuan nasional akan dicapai asal dilaksanakan secara murni dan konsekwen.

1. Sifat-sifat Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila ditetapkan menjadi dasar falsafah atau ideologi Negara RI pada 18 Agustus 1945 ketika Pembukaan dan Undang-undang Dasar 1945 disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia selaku wakil seluruh rakyat Indonesia. Hal itu dilakukan setelah dipikirkan, dimusyawarahkan dan diolah secara matang oleh pemimpin-pemimpin pergerakan dan

¹ Pidato Pejabat Presiden Republik Indonesia Pada Peringatan Hari Lahirnya Pancasila 1 Juni 1967 di Jakarta, Penerbitan Khusus 454, Departemen Penerangan RI, hal. 11

cendekiawan nasional yang duduk dalam Panitia itu. Sesuai dengan sistem pengambilan keputusan yang berlaku di Indonesia sejak dahulu, kelima sila itu dimusyawarahkan secara panjang lebar sampai akhirnya *diterima oleh semua pihak* sebagai dasar Indonesia Merdeka.¹

Dalam proses itu terjadi perdebatan-perdebatan akibat perbedaan-perbedaan pendapat dan cita-cita, khususnya antara golongan Islam dan golongan kebangsaan. Yang pertama memperjuangkan pembentukan Negara Islam, tetapi golongan kebangsaan menolaknya karena menginginkan suatu negara sekuler yang tidak berurusan dengan agama. Pancasila diusulkan sebagai jalan tengah yang mempertemukan kedua keinginan dan pendapat itu, dan akhirnya semua pihak menerimanya. Dengan demikian Pancasila sebagai dasar negara RI adalah suatu *konsensus* yang harus dipegang dengan teguh untuk mencegah terjadinya perpecahan, ketegangan dan konflik sosial, dan untuk memelihara persatuan dan perdamaian antar golongan. "Pancasila adalah perjanjian luhur seluruh Rakyat Indonesia yang harus selalu kita junjung tinggi bersama dan kita bela selama-lamanya", demikian Pejabat Presiden Soeharto dalam pidato kenegaraan 16 Agustus 1967.²

Konsensus itu dicapai tidak hanya karena semua pihak secara mendalam menyadari *perlunya persatuan*, tetapi juga karena Pancasila memuat unsur-unsur yang dijunjung tinggi oleh semua golongan dan lapisan masyarakat Indonesia. Dengan perkataan lain, Pancasila dapat diterima oleh semua pihak karena memuat *unsur-unsur bersama*, sehingga masing-masing dapat melihatnya sebagai miliknya, sebagai bagian penting ideologinya. "Ketuhanan Yang Maha Esa, perikemanusiaan yang adil dan beradab, kebangsaan, demokrasi dan keadilan sosial, semuanya itu telah merupakan nilai-nilai luhur yang menjadi kepribadian Bangsa kita. Pancasila menyatukan semua lapisan dan golongan masyarakat", demikian amanat Presiden

¹ Lihat Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945*, Jilid I (Jakarta, 1971), hal. 145-473; dan *Negara Berketuhanan dan Agama-agama* (Jakarta, 1970), hal. 29

² Pidato Kenegaraan Pejabat Presiden Republik Indonesia Jenderal Soeharto di depan Sidang DPR-GR 16 Agustus 1967, Penerbitan Khusus 461, Departemen Penerangan RI, hal. 10

Soeharto pada peringatan hari ulang tahun ke-25 ABRI di Jakarta pada 5 Oktober 1970.¹

Namun Pancasila adalah juga suatu *kompromi*. Masyarakat Indonesia bersifat pluralistis, terdiri atas banyak golongan yang masing-masing mempunyai pandangan hidup dan ideologinya. Hal itu nampak jelas dalam sejarah penyusunan dasar negara kita. Khususnya golongan Islam memperjuangkan agar Indonesia merdeka dibangun atas ideologi Islam dan menjadi negara Islam. Akan tetapi golongan kebangsaan dan golongan-golongan lain berkeberatan. Sebagai salah seorang eksponen golongan nasional, Prof. Dr. Supomo menandaskan: "Jika kita hendak mendirikan Negara Indonesia yang sesuai dengan keistimewaan sifat dan corak masyarakat Indonesia, maka Negara kita harus berdasar atas aliran pikiran Negara (Staatsidee) integralistik Negara tidak mempersatukan diri dengan golongan yang terbesar dalam masyarakat, juga tidak mempersatukan diri dengan golongan yang paling kuat, melainkan mengatasi segala golongan dan segala perorangan, mempersatukan diri dengan segala lapisan rakyatnya Oleh sebab itu cita-cita negara Islam itu tidak sesuai dengan cita-cita negara persatuan yang telah diidam-idamkan oleh kita semuanya."²

Pancasila mempertemukan kedua pendapat dan keinginan itu. Negara Pancasila bukanlah negara agama, juga bukan negara anti agama, melainkan negara ketuhanan yang memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Golongan Islam mula-mula kurang senang dengan usul untuk membangun Indonesia Merdeka atas dasar Pancasila, tetapi akhirnya menerimanya juga. Mereka menolak negara anti agama, tetapi dapat menerima negara Pancasila yang berketuhanan, sedangkan golongan kebangsaan menolak negara agama, tetapi dapat menerima negara ketuhanan.

¹ Lihat Krissantono, Ed., *Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila* (Jakarta CSIS, 1967), hal. 16

² Dikutip dari Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan UUD 1945*, Jilid I (Jakarta, 1970), hal. 113, 114, 117

Selain itu Pancasila adalah suatu *sintese* atau *perpaduan*, suatu intese antara dasar-dasar kenegaraan yang telah terbukti kebenarannya sepanjang sejarah dengan apa yang baik dan berguna dari tradisi hidup kebangsaan Indonesia untuk menyusun suatu tertib negara modern. Pancasila juga menyatukan dasar-dasar kenegaraan yang lama dan yang baru. Juga dapat dikatakan, bahwa Pancasila mengandung cita-cita mengenai masyarakat dan negara yang lama dalam bentuk baru. Dengan perkataan lain, Pancasila adalah suatu pusaka lama, yang tumbuh dari jiwa dan kebudayaan bangsa Indonesia, tetapi telah berkembang di bawah ilham ide-ide besar dunia menjadi dasar falsafat negara modern. Presiden Soeharto menandakan hal itu sebagai berikut: "Pancasila sebenarnya bukan lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan telah melalui proses yang panjang, dimatangkan oleh sejarah perjuangan Bangsa kita sendiri, melihat pengalaman-pengalaman bangsa-bangsa lain, diilhami oleh ide-ide besar dunia, dengan tetap berakar pada kepribadian Bangsa kita sendiri dan ide besar Bangsa kita sendiri.¹

Dalam garis besarnya dapat dikatakan, bahwa Pancasila adalah falsafat tata negara dan tata hukum yang di satu pihak menjunjung tinggi *martabat dan hak-hak asasi manusia* dan *inisiatif swasta*, tetapi di lain pihak juga menggaris bawahi *persamaan hakiki antar manusia dan keadilan sosial*. Dia adalah suatu aliran falsafat yang menempuh jalan tengah antara individualisme yang terlalu menonjolkan hak-hak individu dan kolektivisme yang secara berlebih-lebihan menonjolkan masyarakat dan seolah-oleh menelan individu. Pancasila memperhatikan kedua dimensi manusia, dimensi individu dan dimensi sosialnya, dalam suatu keseimbangan yang tepat, dan oleh sebab itu termasuk aliran *personalisme*. Dalam aliran ini manusia diakui sebagai persona atau pribadi otonom yang dikaruniai martabat mulia dan hak-hak yang tidak dapat dipindahkan, tetapi sampai pada akar-akarnya juga makhluk sosial, yang hanya dalam masyarakat dapat hidup layak sebagai manusia, mengembangkan pribadinya dan mencapai kesejahteraan. Sesuai dengan visi itu Presiden Soeharto menandakan bahwa

¹ Pidato pada Peringatan Hari Ulang Tahun ke-24 PARKINDO di Surabaya pada 15 Nopember 1969, dalam Krissantono, Ed., *op. cit.*, hal. 10

”Pembangunan adalah untuk manusia dan bukan manusia untuk pembangunan”¹ dalam arti bahwa ” tujuan untuk membangun, dorongan untuk membangun dan cara-cara bagaimana pembangunan itu dilaksanakan sesungguhnya berpangkal pada cita-cita *agar manusia hidup lebih sesuai dengan martabatnya.*”²

Adanya sintese itu terlihat sangat jelas dalam *silasila kerakyatan*. Pergerakan nasional kita dalam cita-cita kemerdekaan bangsa tidak hanya mengambil sikap anti sistem pemerintahan kolonial yang otoriter, menekan, menindas dan bersifat rasialis, melainkan juga tertarik pada gagasan *demokrasi dunia barat*. Akan tetapi cita-cita demokrasinya juga berpijak pada realitas demokrasi asli Indonesia, yang sekalipun terdesak oleh Kolonialisme, tetap bertahan dan hidup terus pada tingkat desa. Yang dimaksud ialah sistem kemasyarakatan dan pemerintahan kolektif yang mengutamakan musyawarah dan mufakat antar semua penduduk dengan nasihat para sesepuh desa, sedangkan pelaksanaan keputusan-keputusan yang diambil bersama-sama secara konsensus itu adalah di tangan kepala desa yang dipilih rakyat. Karya-karya pemimpin-pemimpin pergerakan nasional kita semuanya mengungkapkan *perpaduan antara demokrasi asli dan demokrasi Barat*.³ Tradisi dipadukan dengan unsur-unsur modern untuk melancarkan suatu perkembangan menuju kemajuan. Perpaduan itu akhirnya secara konstitusional ditetapkan dalam Pembukaan UUD 1945 dengan rumusan yang cermat seperti berikut : ”negara republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu kedailan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

1 Pidato Presiden Republik Indonesia Jendral Soeharto pada Upacara Peringatan Ulang Tahun ke-25 Universitas Gajah Mada 19 Desember 1974 di Yogyakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1975, hal. 5-6

2 Pidato Presiden Soeharto pada Peringatan Dies Natalis ke-20 IKIP Bandung pada 5 Desember 1974, dalam Krissantono, Ed., *op. cit.* hal. 41

3 Lihat antara lain Mohammad Hatta, ”Kearah Indonesia Merdeka”, dalam *Kumpulan Karangan 1* (Jakarta, 1976), hal. 90-122; dan disertasi Dr. Haga, *Indonesische en Indische Democratie* (Leiden, 1924)

Dalam rumusan itu tidak hanya tercakup unsur-unsur demokrasi Indonesia asli, tetapi juga sendi-sendi demokrasi barat. Prinsip musyawarah dan mufakat diutamakan atas prinsip "pemerintahan mayoritas" yang kurang memberikan tempat kepada suara minoritas. Lagi pula demokrasi ditempatkan dalam kesatuan Pancasila, sehingga demokrasi Indonesia modern adalah demokrasi yang berke-Tuhan-an Yang Maha Esa, berperikemanusiaan, berkebangsaan dan berkeadilan sosial.

Selanjutnya sintese itu disusun sebagai *pangkal pembaruan lebih lanjut untuk membangun masa depan yang lebih baik*. Masa depan ini di satu pihak harus sesuai dengan tradisi lama, tetapi di lain pihak harus mempergunakan apa saja yang baik dan sesuai di seluruh dunia. Melalaikan unsur-unsur lama itu sama dengan mendirikan suatu gedung di awang-awang. Sebaliknya menolak unsur-unsur baru itu berarti menjauhkan diri dari kemajuan. Akan tetapi dalam proses itu diperlukan suatu keseimbangan yang tepat antara yang lama dan yang baru dan antara yang asli dan yang asing. Pancasila memuat keseimbangan serupa itu. Dia menolak pendirian yang sempit yang enggan mengambil alih unsur-unsur asing, tetapi juga menolak pendirian ekstrem lainnya, yang terlalu bersemangat untuk meniru segala sesuatu yang datang dari barat, yang mengacaukan modernisasi dengan westernisasi. Mengenai hal ini Presiden Soeharto pernah mengutarakan pandangan serupa seperti berikut : "Dan jika dikatakan bahwa pembangunan memerlukan pembaruan, maka pembaruan ini sama sekali bukan 'pembabatan' (westernisasi), yang akan berarti penerapan kebudayaan lain yang asing bagi kita. Pembaruan tidak lain adalah usaha bagi bangsa sendiri untuk secara bagaimana mengembangkan kepribadiannya sendiri, dengan membuang yang buruk dan menguatkan yang baik, mengadakan penyesuaian dengan tuntutan dan kebutuhan pembangunan masyarakat modern."¹

¹ Pidato Presiden Republik Indonesia Jendral Soeharto pada Upacara Peringatan Ulang Tahun ke-25 Universitas Gajah|Mada 19 Desember 1974 di Yogyakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1975, hal. 5-6

2. Arti Pancasila sebagai Dasar Falsafah Negara RI

Penetapan Pancasila menjadi dasar falsafah negara berarti pertama-tama bahwa negara yang dibangun itu adalah *Negara Pancasila*, yang harus tunduk kepadanya, membela dan melaksanakannya dalam seluruh perundang-undangan. Sehubungan dengan itu negara wajib pula membina rakyat agar mengamalkan Pancasila, khususnya dengan menyelenggarakan atau memajukan pendidikan moral Pancasila dan menciptakan suasana yang baik.

Negara Pancasila

Negara Pancasila kiranya dapat dilukiskan secara singkat sebagai berikut. Negara Pancasila adalah suatu negara yang didirikan, dipertahankan dan dikembangkan dengan tujuan untuk *melindungi dan mengembangkan martabat dan hak-hak asasi semua warga bangsa Indonesia* (kemanusiaan yang adil dan beradab), agar masing-masing dapat hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya dan mewujudkan kesejahteraan lahir batin selengkap mungkin, memajukan kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir batin seluruh rakyat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa (keadilan sosial).

Dengan maksud itu dibentuk suatu persatuan yang meliputi seluruh tumpah darah dan segenap bangsa Indonesia, sehingga Negara RI bukan hanya suatu kesatuan politik tetapi juga suatu kesatuan nasional (persatuan Indonesia). Persatuan Indonesia ini sendiri mencerminkan susunan negara nasional yang bercorak bhinneka tunggal ika, bersatu dalam berbagai suku, golongan dan daerah. Akan tetapi nasionalisme itu dijiwai dan dilengkapi sila-sila Pancasila lainnya, khususnya kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mengakui dan menempatkan semua orang di manapun sebagai manusia dan bangsa-bangsa lain sebagai sesama warga umat manusia yang satu dan sama. Maka Negara Pancasila wajib menjalin hubungan kerjasama yang baik dengan negara-negara lain atas dasar kemerdekaan, persamaan, saling menghormati dan saling menguntungkan, tidak hanya bagi kepentingan nasional mereka masing-masing, melainkan juga demi terciptanya dunia baru yang lebih baik yang berdasarkan "kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".

Selanjutnya Indonesia, sebagai negara nasional, adalah suatu negara demokrasi (kerakyatan). Negara nasional bukanlah hanya pemerintah dan aparaturnya, melainkan seluruh bangsa, yaitu pemerintah dan rakyat. Oleh sebab itu negara bukanlah urusan seseorang atau jumlah kecil orang saja, melainkan urusan seluruh bangsa. Kedaulatan adalah di tangan rakyat, tetapi rakyat tidak secara langsung melakukan kedaulatan itu, melainkan lewat MPR yang merupakan pengejawantahan rakyat. Demokrasi Pancasila adalah suatu kerakyatan perwakilan. Selain itu demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, artinya bukan mayoritas yang menentukan, melainkan hikmat kebijaksanaan atau keputusan akal sehat, yang dihasilkan dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat sebagai mufakat. Hanya sebagai jalan terakhir diadakan pemungutan suara. Pemerintah yang dibentuk oleh Presiden yang dipilih MPR menjalankan tugasnya pertama-tama dengan menegakkan dan melaksanakan UUD dan seluruh perundang-undangan lainnya yang merupakan ungkapan dan perumusan kemauan rakyat, dan dalam menjalankan tugasnya itu diawasi oleh wakil-wakil rakyat.

Dalam hubungan ini perlu dicatat, bahwa demokrasi Pancasila terjalin erat dengan sila-sila lainnya, khususnya kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial. Oleh sebab itu negara harus menjunjung tinggi martabat dan hak-hak asasi manusia, tidak hanya orang-orang atau golongan tertentu, melainkan seluruh rakyat. Lagi pula kekuasaan harus digunakan untuk mewujudkan suatu kemakmuran yang merata di antara seluruh rakyat sesuai dengan tuntutan keadilan sosial. Demokrasi serupa itu mengandung jaminan-jaminan bahwa tujuan-tujuan negara akan dicapai sebaik-baiknya. Apabila rakyat ikut serta dalam pemerintahan lewat apa yang disebut "partisipasi sosial, dukungan sosial dan pengawasan sosial", kepentingan-kepentingan mereka akan diperhatikan sewajarnya sehingga kesejahteraan umum terwujud.

Akhirnya Negara Pancasila tidak hanya "menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu" melainkan juga mendorong tumbuhnya kehidupan

keagamaan yang sehat, antara lain dengan menciptakan suasana yang baik baginya dan membina toleransi, sikap saling menghormati dan kerukunan antar umat beragama. Lagi pula negara akan menjalankan tugasnya memajukan kesejahteraan umum sebagai tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Negara Wajib Membela Pancasila

Pertama-tama Negara Pancasila wajib membela dan mengamankan Pancasila terhadap bahaya-bahaya yang mengancamnya dan usaha-usaha untuk merongrong atau menyelewengkannya, antara lain karena salah satu tugas negara ialah memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur bangsa, terutama moralnya. Dalam rangka itu negara hendaknya mengambil tindakan-tindakan yang perlu, antara lain melarang propaganda anti Pancasila atau anti salah satu silanya, mengusut pelanggaran-pelanggarannya dan menindak dengan tegas pelaku-pelakunya. Kewajiban ini adalah fundamental karena Pancasila mempunyai hubungan erat dengan eksistensi Negara Indonesia yang diproklamkan sebagai Negara Pancasila, sehingga menghapus Pancasila sebagai dasarnya berarti menghancurkan Negara Proklamasi. Lagi pula pengalaman berkali-kali menunjukkan bahwa setiap usaha untuk mempersoalkan Pancasila dan menggantinya dengan ideologi negara lain, selalu timbul ketegangan-ketegangan, perpecahan dan sengketa yang mengganggu keamanan dan stabilitas serta mengancam kelangsungan hidup negara.

Negara Tunduk Pada Pancasila

Negara Pancasila tidak berdiri di atas Pancasila, tetapi harus tunduk padanya. Oleh sebab itu Negara Indonesia tidak boleh melanggarnya atau menganggapnya sepi, melainkan wajib menjunjungnya tinggi, mematuhi dan melaksanakannya dalam segala bidang kehidupannya. Dengan maksud itu negara wajib menjabarkannya lebih lanjut dan menerapkannya dalam perundang-undangan, yang mengatur bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan-keamanan. Undang-undang itu tidak hanya harus dibuat dan dilaksanakannya sendiri, melainkan juga dilaksanakan seluruh warga negara. Sehubungan dengan ini negara harus memberikan penyuluhan, bimbingan dan dorongan.

Negara Pancasila bukanlah suatu negara kekuasaan, tetapi suatu negara hukum, suatu negara di mana hukum berdaulat. Negara Indonesia memang mempunyai kekuasaan yang luas, tetapi kekuasaan itu terbatas dan bersifat fungsional, artinya harus digunakannya dalam menjalankan tugasnya. Negara dan pemerintah terikat pada hukum. Dengan demikian kedaulatan negara tunduk pada *kedaulatan hukum*. Sebagai penegak hukum, negara harus menegakkan the rule of law, tetapi the rule of law ini harus diartikan sebagai the rule of just laws atau tegaknya keadilan, bukan semata-mata keadilan legal tetapi keadilan moral. Dengan perkataan lain, hukum di Indonesia harus *bersumber pada moral Pancasila*. Sesuai dengan itu Pancasila ditetapkan sebagai kekuasaan tertinggi, di atas lembaga-lembaga negara (TAP No. XX/MPRS/1966).¹

Pancasila Sumber Tertib Hukum

Sebagai dasar falsafah negara Pancasila tidak hanya menjadi dasar tertib negara tetapi juga *sumber tertinggi tertib hukum* yang harus mengatur kehidupan negara dan masyarakat, dan dengan maksud itu harus dituangkan dalam perundang-undangan, termasuk UUD, peraturan perundangan tertinggi. Secara demikian Pancasila juga menjadi pedoman untuk menafsirkan UUD, menjadi pedoman pelaksanaannya dalam undang-undang, kebijaksanaan dan tindakan-tindakan pemerintah. Seluruh undang-undang tidak hanya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, tetapi sejauh mungkin juga selaras dengan Pancasila dan dijiwai olehnya, dan secara demikian menjadi pelaksanaannya, baik sebagai penerapan, penjabaran dan kesimpulannya maupun jaminan-jaminan pelaksanaannya.

Pancasila dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai cita-cita hukum dan norma hukum yang menguasai hukum dasar negara RI, dan dituangkan dalam pasal-pasal UUD 1945. Pada gilirannya UUD 1945 adalah bentuk peraturan perundangan tertinggi yang menjadi dasar dan sumber perundang-undangan bawahannya. Dengan demikian undang-undang adalah pelaksanaan UUD, dan UUD itu sendiri pelaksanaan Pancasila.

¹ Lihat *Himpunan Ketetapan-ketetapan MPRS Disertai UUD 1945* (Jakarta Pantjuran Tjuj, 1969), hal. 56

Penetapan Pancasila menjadi dasar falsafah negara juga berarti bahwa dalam Negara RI *hukum tidak lepas dari moral*, tetapi berkaitan satu sama lain secara erat. Moral, yaitu moral Pancasila, menjadi sumber hukum. Sebagai konsekwensinya, norma-norma moral menjadi asas-asas utama yang membimbing para pembuat hukum dalam membuat undang-undang. Moral adalah ukuran undang-undang. Tetapi hal ini tidaklah berarti bahwa setiap norma moral harus dijadikan undang-undang, karena hukum negara mempunyai batas-batasnya, yaitu persetujuan rakyat dan kemungkinan pelaksanaannya. Lagi pula kebatinan adalah di luar kompetensi hukum. Hanya norma-norma moral yang mengatur tindakan-tindakan atau hubungan-hubungan lahiriah dapat diundangkan.

Pancasila Jiwa Kehidupan Negara

Sebagai sumber tertib hukum yang mengatur segala bidang hidup kenegaraan, Pancasila menjadi jiwa bidang-bidang itu : politik, pemerintahan, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya dan keamanan pertahanan. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya harus dilaksanakan dalam bidang-bidang itu. Sebagai hasilnya akan terwujud *politik Pancasila, ekonomi Pancasila, pendidikan Pancasila*, dan lain sebagainya. Semuanya itu akan berarti humanisasi masyarakat atau realisasi *masyarakat manusiawi* yang memungkinkan setiap orang hidup wajar sebagai manusia, berkembang dan mewujudkan kesejahteraan lahir batin.

Seluruh kehidupan negara dan hukumnya harus dijiwai kelima sila dari Pancasila, tetapi secara istimewa *kemanusiaan yang adil dan beradab*. Hal ini pertama-tama berarti bahwa di Indonesia setiap orang harus dihormati dan diperlakukan sebagai manusia, sebagai pribadi yang mandiri tetapi juga sosial sampai akar-akar eksistensinya. Martabat dan hak-hak asasinya harus dijunjung tinggi, sehingga dia dapat hidup wajar sebagai manusia dan mengembangkan dirinya selengkap mungkin. Sebagai pribadi setiap orang mempunyai kewajiban asasi untuk mengembangkan dirinya selengkap mungkin, mewujudkan kesejahteraannya lahir batin sesempurna mungkin, dan secara demikian mencapai tujuan eksistensinya. Sehubungan dengan itu manusia dikaruniai hak-hak asasi yang tidak boleh dipindahkan, hak-hak yang semakin diakui sejalan dengan kemajuan umat

manusia. Dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi PBB hak-hak itu telah dirumuskan cukup lengkap dan dinyatakan sebagai cita-cita hukum yang hendaknya dituangkan dalam perundang-undangan dan dilaksanakan oleh bangsa-bangsa. Negara dan hukumnya pertama-tama dimaksud untuk menjamin agar orang-orang dapat memiliki dan menikmati hak-hak itu secara aman dan tertib, seperti ditandaskan dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat: "Semua orang diciptakan sama; mereka dikaruniai oleh Tuhan dengan hak-hak tertentu yang tidak dapat dipindahkan; diantaranya Hidup, Kemerdekaan dan usaha mencapai Kebahagiaan. untuk menjamin hak-hak ini, pemerintah-pemerintah dibentuk di antara orang-orang, yang mendapatkan kekuasaan dari persetujuan mereka yang diperintah. Bilamana bentuk pemerintah apapun menghancurkan hak-hak itu, maka rakyat berhak untuk mengubah atau menghapusnya".¹

Dalam komentarnya atas hukum Inggris Blackstone merumuskan kebenaran itu seperti berikut : "Karena tujuan pokok masyarakat ialah melindungi orang-orang dalam menikmati hak-hak mutlak itu, yang diberikan kepada mereka oleh hukum kodrati yang tidak berubah, tetapi yang tidak dapat dipelihara secara damai tanpa bantuan timbal balik dan pergaulan hasil pembentukan masyarakat yang bersahabat dan sosial. Oleh sebab itu disimpulkan, bahwa tujuan pertama dan utama undang-undang manusia ialah memelihara dan mengatur hak-hak mutlak orang-orang ini".²

Sesuai dengan rumusannya, sila kemanusiaan yang adil dan beradab menuntut *keadilan*, yaitu sila yang mewajibkan manusia dan negara untuk bertindak adil terhadap manusia, untuk memberikan atau membiarkan apa yang menjadi haknya. Hak-hak itu harus dihormati. Dalam rangka itu diperlukan hukum yang merumuskan dan mengaturnya, agar pelaksanaan hak-hak orang yang satu tidak melanggar hak-hak orang lain. Manusia tidak hanya berhak menuntut hak-haknya, tetapi juga wajib mengakui dan menghormati hak-hak sesamanya. Tugas

1 Disalin dari naskah yang dimuat dalam *Encyclopaedia Americana* (New York, 1971), Jilid VIII, hal. 591

2 Blackstone, *Commentaries on the laws of England* (London, 1849), hal. 126

negara ialah menjamin agar hak-hak semua orang dihormati. "Di dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya setiap orang harus tunduk hanya kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak bagi hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat benar dari kesusilaan, tata tertib umum serta keselamatan umum dalam suatu masyarakat demokratis". Demikian pasal 29 ayat 2 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi PBB.¹

Selanjutnya keadilan harus diambil dalam arti yang menyeluruh dan juga mencakup *keadilan sosial*. Maksud keadilan bukanlah semata-mata menjamin hak-hak orang-orang atau golongan-golongan tertentu dalam masyarakat dan negara, tetapi hak-hak semua warganya. Dalam rangka itu negara tidak hanya wajib merumuskan se jelas mungkin dan selengkap mungkin manakah hak-hak itu, tetapi juga menjamin agar tiap-tiap warganya dapat menikmatinya secara aman. "Tujuan setiap masyarakat nasional ialah membina dan mendorong, dalam dan lewat kerjasama, perkembangan selengkap mungkin semua kemampuan pribadi semua warganya; dan tujuan ini ialah keadilan, atau 'pengaturan tepat', masyarakat serupa itu, dan oleh sebab itu dapat disebut keadilan sosial".²

Selain itu harus kita ingat bahwa kemanusiaan Pancasila adalah kemanusiaan yang *beradab*, artinya kemanusiaan yang mewajibkan kita untuk memperlakukan setiap orang sesuai dengan martabatnya yang mulia. Antara lain kita dilarang untuk memperlakukan seseorang di luar batas perikemanusiaan secara kejam ataupun main hakim sendiri untuk mendapatkan apa yang kita pandang sebagai hak kita. Memperjuangkan hak-hak kita hendaknya secara beradab, lewat pengadilan yang teratur, sehingga kepastian hukum terjamin. Beberapa pasal dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi telah merumuskan dengan baik perlakuan yang selaras atau bertentangan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab itu. Pasal 5 misalnya berbunyi :

1 Disalin dari naskah yang dimuat dalam Ian Brownlie, Ed., *Basic Documents on Human Rights* (Oxford, 1971), hal. 112

2 Ernest Barker, *Principles of social and political theory* (Oxford, 1967), hal. 123

”Tiada seorang juapun boleh dianiaya, atau diperlakukan secara kejam, dengan tak mengingat kemanusiaan ataupun dengan jalan perlakuan atau hukuman yang menghinakan (degrading)”, dan pasal 11 ayat 1 : ”Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu pelanggaran pidana dianggap tak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut undang-undang yang berlaku dalam suatu sidang pengadilan yang terbuka, dan dia di dalam sidang itu diberikan segala jaminan yang perlu untuk pembelaannya”.¹

Sebagai dasar falsafah negara, Pancasila selanjutnya membantu kita untuk menetapkan sikap kita dalam menghadapi segala macam masalah, seperti ditandaskan oleh Presiden Soeharto pada Peringatan Hari Lahirnya Pancasila di Jakarta, 1 Juni 1967 : ”Dengan dasar falsafah Negara itu kita dapat menentukan pendirian kita terhadap segala macam masalah pokok yang kita hadapi baik masalah-masalah dalam negeri maupun masalah-masalah luar negeri”.² Lagi pula memberikan bimbingan kepada segala gerak kegiatan Negara dan menjadi pedoman bagi Pemerintah dan seluruh aparaturnya dalam melaksanakan tugasnya.

Dasar Pembangunan Nasional

Pancasila sebagai dasar falsafah negara akhirnya juga menjadi dasar atau landasan pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang. Hal itu pertama-tama berarti bahwa *manusia menduduki tempat yang sentral dalam pembangunan*, tidak hanya sebagai pelaku tetapi juga sebagai tujuannya. ”Pembangunan adalah untuk manusia dan bukan manusia untuk pembangunan”, demikian Presiden Soeharto pada Peringatan Ulang Tahun ke-25 Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, 19 Desember 1974. Memang manusia wajib ikut serta dalam pembangunan dan dalam rangka itu memeras otak serta mengerahkan tenaganya, tetapi dia tidak boleh diperalat atau diperlakukan sebagai alat belaka. Pembangunan nasional adalah untuk kepentingan manusia, untuk kesejahteraan lahir dan batin. Secara yang lebih lengkap Presiden Soeharto

1 Lihat Ian Brownlie, Ed., *op. cit.*, hal. 109

2 Kutipan dari Penerbitan Khusus 454, Departemen Penerangan RI, hal. 6

mengatakan bahwa " tujuan untuk membangun, dorongan untuk membangun dan cara-cara bagaimana pembangunan itu dilaksanakan sesungguhnya berpangkal pada cita-cita agar manusia hidup lebih sesuai dengan martabatnya",¹

Dari prinsip itu antara lain disimpulkan bahwa pembangunan nasional tidak hanya harus memberikan *prioritas tinggi kepada perluasan kesempatan kerja*, sehingga setiap orang yang mampu dan mau dapat bekerja secara produktif, tetapi juga menjamin agar dia mendapatkan *balas karya yang wajar* dan dapat bekerja dalam lingkungan sehat *dan dengan syarat-syarat kerja yang baik*. "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan", demikian pasal 27 UUD 1945. Manusia tidak dapat hidup sejahtera kalau tidak mempunyai pekerjaan tetap sekalipun dicukupi kebutuhan materiilnya sehari-hari. Pekerjaan tidak hanya mempunyai nilai ekonomi melainkan juga nilai kemanusiaan yang tinggi.

Oleh sebab manusia adalah tujuan pembangunan maka "harkat dan harga diri manusia menampilkan dirinya secara nyata dalam segala gerak pembangunan, khususnya dalam proses produksi". Demikian Presiden Soeharto pada Pembukaan Seminar Nasional Hubungan Perburuhan berdasarkan Pancasila di Jakarta, 4 Desember 1974.² Oleh sebab itu ditandaskan "Bahwa peningkatan produksi adalah untuk kebahagiaan dan meningkatkan martabat manusia; bukan sebaliknya, manusia akan hanya menjadi alat produksi dan merosotnya martabat manusia. Apabila ini terjadi, maka betapapun meningkat dan besarnya produksi terpaksa harus dikatakan bahwa pembangunan tidak mencapai tujuan dan cita-citanya".³ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tujuan pembangunan nasional ialah memungkinkan setiap orang hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya selengkap mungkin dan mencapai kesejahteraan lahir batin sesempurna mungkin.

1 Pidato pada Peringatan Dies Natalis ke-20 IKIP Bandung 5 Desember 1974, dalam Krissantono, Ed., *op. cit.*, hal. 41

2 Dikutip dari Krissantono, Ed., *op. cit.*, hal. 40

3 *Ibid.*

Sesuai dengan keadilan sosial maka tujuan pembangunan nasional bukanlah orang-orang atau golongan-golongan tertentu tetapi *seluruh rakyat*. "Sila keadilan sosial menghendaki adanya kemakmuran yang merata di antara seluruh rakyat; bukan merata yang statis melainkan merata yang dinamis dan meningkat. Artinya seluruh kekayaan alam Indonesia, seluruh potensi Bangsa, diolah bersama-sama menurut kemampuan dan bidang masing-masing, untuk kemudian dimanfaatkan bagi kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat. Keadilan sosial berarti harus melindungi yang lemah; hal ini bukan berarti yang lemah lalu boleh tidak bekerja dan sekedar menuntut perlindungan, melainkan sebaliknya justru harus bekerja menurut kemampuan dan bidangnya. Perlindungan yang diberikan adalah untuk mencegah kesewenang-wenangan dari yang kuat, untuk menjamin adanya keadilan", demikian Pejabat Presiden Soeharto dalam sambutannya pada Peringatan Hari Lahirnya Pancasila di Jakarta, 1 Juni 1967. ¹

Oleh sebab itu *sejak permulaan harus diambil langkah-langkah untuk keadilan sosial*. Sehubungan dengan itu Presiden Soeharto berkata : "Pembangunan yang kita kerjakan bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, melainkan bersamaan dengan itu harus dapat diletakkan dasar-dasar bagi keadilan sosial; pembangunan kita bukan hanya usaha menaikkan produksi, melainkan berbarengan dengan itu harus berarti meluasnya kesempatan kerja" ², dan "Karena itu dalam usaha memajukan ekonomi telah harus dimulai langkah-langkah untuk meletakkan dasar bagi keadilan; adil dalam memikul beban pembangunan dan adil dalam menikmati hasil pembangunan. Usaha ini menonjolkan dua segi. Pertama, pembangunan harus berarti peningkatan hidup rakyat banyak; dan yang kedua, pembangunan harus merata ke seluruh pelosok tanah air. Dalam arti ini telah terkandung keharusan pembangunan daerah sampai ke desa-desa" ³.

¹ Penerbitan Khusus 454, Departemen penerangan RI, hal. 9-10

² Pidato pada Pembukaan Kongress ke-XIII PGRI di Jakarta, 21 Nopember 1973, dalam Krissantono, Ed., *op. cit.*, hal, 76

³ Pidato pada Sidang Umum MPR, 12 Maret 1973, dalam Krissantono, Ed., *op. cit.*, hal. 77

Dengan maksud itu masyarakat Indonesia harus *dibangun kembali menjadi masyarakat manusiawi* (humane society), yang memungkinkan setiap warganya hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya dan mewujudkan kesejahteraan lahir batin selengkap mungkin. Itulah *masyarakat Pancasila* yang oleh Presiden Soeharto dirumuskan sebagai "masyarakat yang berasaskan kekeluargaan dan religius, atau kalau meminjam rumusan yang populer : Masyarakat Pancasila adalah masyarakat yang sosialis religius dengan ciri-ciri pokok : tidak membenarkan adanya kemelaratan, keterbelakangan, perpecahan, pemerasan, kapitalisme, feodalisme, kolonialisme dan imperialisme; karenanya harus bersama-sama menghapuskannya dan menghayati hidupnya dengan berkewajiban : taqwa pada Tuhan Yang Mahaesa, cinta pada Tanah Air, kasih sayang pada sesama manusia, suka bekerja dan rela berkorban untuk kepentingan rakyat. Penghayatannya harus dimulai dari pribadi-pribadinya dengan jalan selalu mengendalikan kepentingan-kepentingan pribadinya untuk memperbesar kewajibannya sebagai makhluk sosial terhadap masyarakat, bangsa dan negara. Memikirkan bersama, untuk kemudian menerima bersama dan melaksanakan bersama-sama pancaran dan isi dan jiwa Pancasila sebagai pegangan di segala segi kehidupan kita merupakan tanggung jawab kita di masa kini dan masa nanti".

II. PANCASILA PANDANGAN HIDUP BANGSA

Menurut Memorandum DPR-GR 9 Juni 1966, yang telah disahkan MPRS dengan ketetapannya No. XX/MPRS/1966, Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang telah *dimurnikan dan dipadatkan* menjadi dasar Negara RI. ² Hal ini dikukuhkan Presiden Soeharto ketika pada Peringatan Ulang Tahun ke-25 Universitas Gadjah Mada tanggal 19 Desember 1974 beliau mengatakan bahwa Pancasila "merupakan *nilai-nilai luhur yang lahir dan tumbuh dari sejarah dan kebudayaan*

1 Pidato pada Peringatan Dies Natalis ke-XXV Universitas Indonesia di Jakarta, 15 Pebruari 1975, dalam Krissantono, Ed., *op. cit.*, hal. 22-23

2 Lihat *Himpunan Ketetapan-ketetapan MPRS Disertai UUD 1945* (Jakarta : Pantjuran Tujuh, 1969), hal. 47

kita yang telah berabad-abad lamanya".¹ Apa yang terkandung dalam Pancasila telah hidup di bumi Indonesia sejak berabad-abad sebagai pandangan hidup, yang juga disebut falsafah hidup atau Weltanschauung dalam bahasa Jerman. Yang dimaksud ialah suatu pandangan menyeluruh tentang hakikat, asal, nilai, tujuan dan arti dunia seisinya, khususnya manusia dan kehidupannya, suatu pandangan yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia telah berabad-abad lamanya berakar dan hidup dalam hati sanubari, watak, kepribadian dan pergaulan hidup bangsa Indonesia. Oleh sebab itu Bung Karno dengan tegas menolak anggapan seolah-olah Pancasila itu buah ciptaannya. "Saya bukanlah Pencipta Pancasila, saya bukanlah pembuat Pancasila. Apa yang saya kerjakan tempo hari ialah sekedar memformulir perasaan-perasaan yang ada di kalangan rakyat dengan beberapa kata yang saya namakan 'Panca Sila' ... saya sekedar menggali di dalam bumi Indonesia dan mendapatkan lima berlian, dan lima berlian inilah saya anggap dapat menghiasi tanah air kita ini dengan cara yang seindah-indahnya", demikian Bung Karno dalam pidatonya pada 17 Agustus 1945.²

Sejak dahulu orang-orang Indonesia diresapi rasa hormat dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, asal dan tujuan segala sesuatu lainnya termasuk manusia, menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Hal itu antara lain dapat dilihat dalam adanya mesjid-mesjid, candi-candi, kuil-kuil, kelenteng-kelenteng, gereja-gereja, tempat-tempat pesajen dan lain sebagainya. Mereka menganut agama atau kepercayaan mereka masing-masing dalam suasana toleransi dan kerukunan karena yakin bahwa semua agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah baik dan pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama.

¹ Pidato Presiden Republik Indonesia Jendral Soeharto pada Upacara Peringatan Ulang Tahun ke-25 Universitas Gajah Mada 19 Desember 1974 di Yogyakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1975, hal. 14. Penggarisbawahan oleh penulis.

² Dikutip dari Moch. Said, *Pedoman untuk melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat*, Jilid II (Surabaya, 1961), hal. 1667-1694

Perikemanusiaan dijunjung tinggi seperti terungkap dalam sikap yang dalam bahasa Jawa disebut sikap "tepa selira", yang memperlakukan sesama manusia sebagaimana orang ingin diperlakukan oleh orang lain. Orang melihat orang lain sebagai sesama atau seorang yang sama martabat, hak-hak, kewajiban-kewajiban; dan tanggung jawabnya, senasib dan sepenanggungan.

Di dalam masyarakat-masyarakat adat hak milik perorangan diakui tetapi dibatasi oleh semangat tolong-menolong secara kekeluargaan. Terlihat pula semangat keadilan sosial yang menjadi dasar pembagian tanah, yang dilakukan secara demokratis dalam permusyawaratan semua warga atau kepala keluarga. Unsur kerakyatan ini dipraktekkan dalam bentuk rapat, musyawarah, mufakat, gotong royong, protes bersama terhadap kebijaksanaan atau tindakan raja yang dianggap tidak adil atau menyingkir dari wilayah kekuasaan raja. Dengan cara-cara itu rakyat mengungkapkan sikapnya dan menyalurkan partisipasinya dalam urusan-urusan bersama. Juga rasa kebangsaan sampai batas-batas tertentu telah terdapat di antara penduduk Indonesia dan beberapa kali dalam sejarah bahkan menonjol perkembangannya, misalnya pada waktu kejayaan Kerajaan Majapahit ketika wilayahnya meliputi seluruh Kepulauan Nusantara.

Akan tetapi Pancasila belum merupakan seluruh pandangan hidup bangsa Indonesia, melainkan salah satu bagian penting, terdiri atas unsur-unsur yang baik. Pancasila adalah *bagian moral* pandangan hidup itu, dan inipun terbatas pada *unsur-unsur bersama yang relevan bagi hidup kenegaraan*. Pandangan hidup mengandung banyak unsur lainnya, tetapi Pancasila sebagai moralnya adalah bagian penting, antara lain karena menjiwai seluruh bidang kehidupan manusia, baik individu maupun sosial. Memorandum DPR-GR tersebut melihat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah *dimurnikan dan dipadatkan*.

Dari pandangan hidup itu Pancasila diambil dan ditetapkan sebagai dasar falsafah negara karena meliputi *unsur-unsur bersama* di seluruh tanah air sehingga dapat diterima semua

golongan, dan memuat unsur-unsur yang *relevan sebagai dasar negara Indonesia*. Dalam pidato kenegaraan 16 Agustus 1967 Pejabat Presiden Soeharto antara lain berkata bahwa "Pancasila adalah kepribadian kita, adalah pandangan hidup seluruh bangsa Indonesia, pandangan hidup yang disetujui oleh wakil-wakil rakyat menjelang dan sesudah Proklamasi Kemerdekaan kita; oleh sebab itu Pancasila adalah satu-satunya pandangan hidup yang dapat pula mempersatukan kita. Pancasila adalah perjanjian luhur seluruh Rakyat Indonesia yang selalu harus kita junjung tinggi bersama dan kita bela selama-lamanya".¹

Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila adalah *sangat penting, bahkan perlu*, untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan memajukan perkembangannya. "Suatu Bangsa memang harus mempunyai satu pandangan hidup, agar dengan demikian Bangsa itu melihat dengan jelas semua persoalan yang dihadapinya dan ke arah mana tujuan hidup yang akan dicapainya. Tanpa pegangan hidup itu Bangsa terombang-ambing oleh berbagai masalah besar yang dihadapinya, baik masalah-masalah dalam negeri maupun masalah-masalah luar negeri", demikian Presiden Soeharto dalam pidatonya pada Upacara Peringatan Lahirnya Pancasila di Jakarta, 1 Juni 1968.² Pada Peringatan Hari Lahirnya Pancasila tahun sebelumnya, beliau secara singkat tetapi lengkap menguraikan kedudukan Pancasila yang penting itu seperti berikut : "Karena Pancasila merupakan pandangan hidup kita, maka Pancasila itupun menjadi tuntunan hidup dan tujuan hidup Bangsa Indonesia; ia menjadi sumber tertib sosial, ia menjadi sumber tertib seluruh perikehidupan kita, baik sebagai individu, maupun dalam ikatan golongan, ikatan Partai Politik, ikatan Organisasi, ia merupakan sumber tertib Negara dan tertib hukum serta harus menjadi pedoman dan dilaksanakan oleh Pemerintah semua aparaturnya dan oleh setiap pejabat dalam menjalankan kekuasaan serta tugasnya".³

1 Penerbitan Khusus 461, Departemen Penerangan RI, hal. 10

2 Pidato Presiden Republik Indonesia pada Upacara Peringatan Lahirnya Pancasila 1 Juni 1968, Seri Amanat 9, Departemen Penerangan RI, hal. 6

3 Penerbitan Khusus 454, Departemen Penerangan RI, hal. 6

Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila adalah *terbuka terhadap unsur-unsur kebudayaan lain* yang dianggap sesuai dengan corak kehidupan asli dan dapat memperkaya serta menyempurnakannya. Keterbukaan ini adalah salah satu ciri kebudayaan Indonesia sejak dahulu. Sepanjang sejarah kebudayaan Indonesia selalu bersedia mengambil alih unsur-unsur kebudayaan lain yang selaras dan dalam proses akulturasi itu menjadi semakin kaya. Terdorong oleh keinginan untuk maju, bangsa Indonesia tidak segan-segan mengambil alih kekayaan kebudayaan lain dan mengintegrasikannya dalam kebudayaannya sendiri.¹ Secara demikian terjadilah pembaruan-pembaruan yang seluas-luasnya atas dasar yang telah ada sebagai bekal untuk menghadapi masa depan atau untuk membangun masa depan yang lebih baik. Masa depan ini harus sesuai dengan tradisi lama dan merupakan kelanjutannya, tetapi juga menggunakan apa saja yang baik dari manapun yang dapat memperkaya. Hanya saja diusahakan agar terpelihara suatu *keseimbangan yang baik* antara unsur-unsur yang lama dan baru itu. Itulah yang kita lihat dalam Pancasila, suatu keseimbangan antara pusaka lama dan unsur-unsur baru, antara unsur-unsur asli dan unsur-unsur asing, antara unsur-unsur barat dan timur. Dapat dikatakan bahwa Pancasila adalah suatu pusaka lama yang bangkit kembali dalam corak baru sesuai dengan keadaan dan tuntutan jaman modern. "Pancasila sebenarnya bukan lahir secara mendadak pada tahun 1945; melainkan telah melalui proses yang panjang, dimatangkan oleh sejarah perjuangan Bangsa kita sendiri, melihat pengalaman bangsa-bangsa lain, diilhami ide-ide besar dunia, dengan tetap berakar pada kepribadian Bangsa kita sendiri dan ide besar Bangsa kita sendiri", demikian Presiden Soeharto pada Peringatan Hari Ulang Tahun ke-XXIV PARKINDO di Surabaya, 15 Nopember 1969.²

1 Lihat Rahmat Subagya, *Pancasila Dasar Negara Indonesia* (Yogyakarta, 1955), hal. 44

2 Dikutip dari Krissantono, Ed. *op. cit.*, hal. 10

III. PENUTUP

Implikasi penetapan Pancasila sebagai dasar falsafah atau ideologi Negara Indonesia adalah sangat luas dan mendalam, tetapi belum diketahui sepenuhnya, sehingga kita belum dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya dari hal yang sangat menguntungkan itu. Tetapi garis besarnya dapat dirumuskan sebagai berikut. Sebagai dasar Negara Pancasila adalah sumber tertib negara dan tertib hukumnya, kekuasaan tertinggi, jiwa UUD 1945 dan pedoman untuk menafsirkannya dan untuk melaksanakannya dalam peraturan-peraturan perundangan, pedoman kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, dan pedoman pelaksanaan tugas kehakiman. Pendek kata, Pancasila adalah norma tertinggi kehidupan negara dan pembangunan nasional.

Hal itu juga berarti bahwa Negara Indonesia memiliki jaminan-jaminan bahwa tujuan-tujuannya akan dicapai, akan tetapi asas-asas yang terkandung dalam Pancasila harus dilaksanakan secara murni dan konsekwen, baik oleh pemerintah dan aparaturnya maupun oleh rakyat. Untuk mencapai tujuan-tujuan nasional itu keahlian dan teknologi saja tidak cukup, tetapi juga diperlukan pelaksanaan Pancasila. Oleh sebab itu negara tidak hanya memerlukan teknokrat-teknokrat, melainkan juga ahli-ahli moral Pancasila. Khususnya para pejabat negara dan pemerintah perlu memahami implikasi-implikasinya bagi bidang mereka masing-masing.

Sehubungan dengan itu perlu disusun hukum nasional menyeluruh atas dasar Pancasila untuk menggantikan hukum warisan jaman kolonial dan feodal yang mengandung banyak unsur yang tidak hanya ketinggalan jaman tetapi juga bertentangan dengan ideologi Negara. Dalam rangka itu hukum yang berlaku selama ini perlu ditinjau kembali, dihilangkan kelemahan-kelemahannya dan dilengkapi kekurangan-kekurangannya.

Yang lebih penting lagi, hukum nasional serupa itu harus dilaksanakan dengan baik. Pemerintah tidak hanya wajib menjaga agar hukum dipatuhi oleh rakyat, tetapi juga mematuhi sendiri dan dalam menjalankan tugasnya selalu berpegangan pada hukum. Pemerintah tidak di atas hukum tetapi

tunduk padanya. Khususnya Lembaga Kehakiman bertugas menegakkan hukum dan keadilan secara efisien. Hal ini antara lain menuntut agar dia dapat menjalankan tugasnya secara bebas dan dengan keahlian, sehingga dapat memeriksa dan mengadili perkara-perkara secara jujur dan obyektif menurut hukum tanpa pandang bulu.

Dalam rangka penghayatan dan pelaksanaan Pancasila pendidikan moral Pancasila adalah salah satu sarana yang sangat penting. Hal itu dapat dilakukan lewat pendidikan formil maupun informil dan lewat undang-undang. Sasaran undang-undang bukanlah semata mata pencegahan kejahatan-kejahatan dan dilakukannya tindakan-tindakan baik tetapi juga pembinaan warganegara menjadi orang baik. Dengan membiasakannya berbuat baik, undang-undang lambat laun membimbingnya menjadi orang baik, sehingga dengan mudah, cepat dan senang melakukan hal-hal yang baik atas keyakinannya sendiri.

PANCASILA MORAL BANGSA INDONESIA SUATU PENGANTAR

Kirdi DIPOYUDO

Dengan tepat dikatakan bahwa Pancasila adalah pandangan hidup bangsa dan dasar negara Indonesia. Akan tetapi bila kita mengadakan suatu penyelidikan yang lebih mendalam, kita akan mengetahui bahwa pada hakikatnya Pancasila adalah suatu kesatuan bulat asas-asas budi pekerti atau moral, yang kiranya dapat disebut moral Bangsa Indonesia atau moral Pancasila untuk membedakannya dari lain-lain moral. Dengan demikian penetapan Pancasila sebagai dasar falsafah negara berarti bahwa moral bangsa telah menjadi moral negara, yaitu moral yang mengikat negara. Selanjutnya hal itu berarti bahwa moral Pancasila telah menjadi sumber tertib negara dan sumber tertib hukumnya serta jiwa seluruh kegiatan negara dalam segala bidang kehidupannya. Dengan sengaja Negara Indonesia dibangun atas dasar moral dan sebagai konsekwensinya tunduk kepada moral dan wajib membela dan melaksanakannya serta menjamin agar rakyat juga melaksanakannya.

Oleh sebab itu untuk memahami Pancasila dalam rangka penghayatan dan pelaksanaannya, kita tidak cukup membahasnya sebagai dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa, melainkan harus juga memperhatikan bahwa kelima sila Pancasila itu adalah asas-asas budi pekerti atau moral. Selain itu kita harus melihatnya sebagai satu kesatuan bulat. Kita dapat dan harus membedakan sila yang satu dari sila yang lain, tetapi

kita tidak boleh memisahkannya karena sila-sila itu saling membatasi dan saling memperkaya. Kelima sila itu adalah suatu kesatuan gagasan-gagasan fundamentil yang menyeluruh tentang kehidupan manusia, baik sebagai perorangan maupun sebagai warga masyarakat dan negara. Dia mengikat baik perorangan maupun masyarakat dan negara.

1. PANCASILA ADALAH MORAL

Baik menurut arti etimologis maupun arti sebenarnya Pancasila adalah suatu kesatuan asas-asas budi pekerti atau moral. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dan terdiri atas dua kata, yaitu panca dan sila. Panca berarti lima dan sila asas atau kewajiban moral, sehingga Pancasila berarti lima kewajiban moral. Itulah arti sila dalam kesusasteraan Hindu Kuno. Agama Budha bahkan mengenal istilah Pancasila dan Dasasila dalam arti yang sama. Dasasila adalah sepuluh kewajiban moral untuk para bhiksu, sedangkan Pancasila adalah untuk para upasaka dan upasika dan meliputi lima larangan moral, yaitu larangan membunuh, mencuri, berzinah, berdusta dan minuman keras. Arti sila sebagai asas moral itu juga terdapat dalam kesusasteraan Indonesia kuno. Pada pertengahan abad ke-14 misalnya Prapanca memakai kata Pancasila dalam bukunya *Negarakertagama* dengan arti lima pantangan moral¹

Juga menurut *arti sebenarnya* Pancasila adalah moral, terdiri atas lima norma moral, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial itu adalah moral sudah jelas. Mengenai persatuan Indonesia dan kerakyatan soalnya tidak begitu jelas, tetapi keduanya juga mempunyai segi moral dan mempunyai hubungan erat dengan moral. Baik dari pembicaraan-pembicaraan sekitar Proklamasi Kemerdekaan maupun dari rumusannya dalam Mukaddimah UUD RIS dan

1 Lihat Rahmat Subagya, *Pancasila Dasar Negara Indonesia* (Yogyakarta, 1955), hal. 28

Mukaddimah UUD Sementara tahun 1950 adalah jelas bahwa persatuan Indonesia adalah sinonim dengan nasionalisme, sedangkan kerakyatan dalam arti pemerintahan oleh, dari dan untuk rakyat adalah juga suatu tuntutan moral.

2. PANCASILA ADALAH MORAL BANGSA INDONESIA

Selanjutnya Pancasila dapat disebut moral bangsa Indonesia dalam arti bahwa Pancasila meliputi apa yang disebut dalam bahasa Inggris *public morality*.¹

Kenyataannya Pancasila adalah suatu keseluruhan *unsur-unsur bersama berbagai moral* yang terdapat di Indonesia. Sebagaimana diketahui di tanah air kita terdapat berbagai moral sesuai dengan adanya berbagai agama dan kepercayaan. Kita jumpai moral Islam, moral Katolik, moral Kristen Protestan, moral Hindu Bali, moral Kong Hu Cu, dan moral aliran-aliran kepercayaan. Masing-masing moral itu mempunyai coraknya sendiri, berbeda satu sama lain dan bersifat relatif dalam arti hanya berlaku bagi golongan atau umat yang bersangkutan. Misalnya moral Islam hanya berlaku bagi umat Islam, moral Kristen hanya bagi umat Kristen, moral Hindu Bali hanya bagi umat Hindu Bali dan seterusnya.

Namun dalam moral-moral itu terdapat pula unsur-unsur bersama. Pancasila adalah moral yang terdapat dalam berbagai moral itu sebagai unsur bersama, yang oleh sebab itu dapat diterima oleh semua golongan, oleh seluruh rakyat Indonesia, dan menjadi pemersatu. Untuk membedakannya dengan moral-moral itu, moral bersama itu dengan tepat disebut *moral Pancasila*. Moral ini terdapat dalam moral-moral yang hidup di Indonesia, tetapi tidak identik dengan moral-moral itu karena selain moral Pancasila moral-moral itu memuat asas-asas moral lain, misalnya asas-asas yang mengatur kehidupan seks.

Dengan demikian maka moral Pancasila itu *mengatasi semua golongan dan benar-benar bersifat nasional*. Juga

¹ Lihat Patrick Devlin, *The Enforcement of Morals* (London, 1973), antara lain hal. 7-8; dan Basil Mitchell, *Law, Morality, and Religion in a Secular Society* (London, 1970), khususnya hal. 40-51

menjadi jelas bahwa moral Pancasila bukan seluruh moral, bukan moral yang mengatur seluruh kehidupan manusia. Dalam hubungan ini perlu dicatat, bahwa asas-asas Pancasila itu adalah *asas-asas moral yang relevan sebagai dasar negara*. Pancasila adalah moral bangsa yang relevan bagi negara. Dari moral-moral yang hidup di Indonesia kelima sila Pancasila diambil dan ditetapkan sebagai dasar negara karena dua alasan pokok, pertama karena bersifat umum sehingga dapat diterima oleh semua pihak dan kedua karena relevan untuk dijadikan dasar negara. Oleh sebab itu dapat dikatakan, bahwa Pancasila adalah lima asas moral yang ditetapkan menjadi dasar Negara RI.

Namun moral Pancasila itu bukan semata-mata moral bangsa Indonesia, melainkan moral yang mengikat seluruh umat manusia dan oleh sebab itu dapat disebut *moral universal*. Sila-sila itu berakar pada kodrat manusia dan oleh sebab itu inheren dalam eksistensi manusia sebagai manusia. Dengan mempelajari kodrat manusia kita dapat menemukan kelima sila itu sebagai pedoman untuk bertindak. Sesuai dengan dalil bahwa segala sesuatu harus bertindak searas dengan kodratnya masing-masing, maka manusia wajib bertindak secara rasionil, mengikuti perintah akal budinya, mematuhi asas-asas yang dikenal akal budinya sebagai pedoman bagi tindakan-tindakannya. Manusia mempunyai kemampuan untuk mengenal kodratnya dan norma-norma yang harus ditaatinya untuk mencapai tujuan eksistensinya sebagai manusia, yaitu kesempurnaan dan kesejahteraan lahir batin selengkap mungkin. Norma-norma moral itu dijabarkan dari kodrat manusia dan oleh sebab itu dengan tepat disebut *moral kodrati* (natural morals). Orang yang memaatuhinya disebut baik dari segi moral (morally good) atau baik sebagai manusia atau juga manusia susila.

Dengan demikian moral kodrati merupakan pedoman bagi tingkah laku manusia yang inheren dalam kodratnya dan dapat dikenal dengan akal budinya lewat suatu pemikiran yang saksama dan tekun, seperti halnya dengan filsuf-filsuf Yunani, meskipun pada umumnya orang mengenalnya lewat agama atau tradisi bangsa atau golongannya. Moral kodrati ini ada bersama-sama dengan kodrat manusia, muncul bersama-sama dengan manusia, tetapi manusia tidak mengenalnya sekaligus

secara lengkap dan tepat. Manusia mempunyai kemampuan untuk mengenalnya, tetapi karena berbagai faktor banyak orang tidak sampai mengenalnya secara lengkap dan tepat. Lagi pula pengetahuan moral umat manusia berkembang sejalan dengan kemajuan pengetahuan manusia tentang dirinya, kebutuhan-kebutuhan dan kecenderungan-kecenderungannya, tentang alam sekitarnya dengan hukum yang mengaturnya. Sesuai dengan itu generasi yang satu menerima pengetahuan moral generasi sebelumnya dan meneruskannya kepada generasi berikutnya setelah mengembangkan dan menyempurnakannya lebih lanjut dengan pemikiran dan pengalamannya sendiri maupun dengan mengambil alih unsur-unsur tertentu dari kebudayaan-kebudayaan lain.¹ Sebagai ilustrasi dapat dilihat sejarah perumusan *Deklarasi Universal Hak-hak Asasi PBB* yang banyak memuat cita-cita moral umat manusia yang hendaknya dituangkan dalam perundangan bangsa-bangsa sebagai norma-norma hukum politif.

Norma-norma moral itulah yang pertama-tama harus menjadi pedoman kehidupan manusia, baik individu maupun sosial, termasuk kehidupan negara. Moral memuat cita-cita moral dan cita-cita hukum yang harus membimbing manusia dalam membuat undang-undang positif, yang pada gilirannya merupakan sarana pokok di tangan negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum.²

Moral Pancasila adalah moral kodrati sejauh dikenal dan sampai batas-batas tertentu dilaksanakan bangsa Indonesia (dan bangsa-bangsa lain karena bersifat universal). Pancasila berakar pada kodrat manusia dan semua orang di mana pun adalah sama sebagai manusia. Dalam Memorandum DPRGR 9 Juni 1966, yang disahkan MPRS dengan ketetapan No. XX/MPRS/1966 secara tepat dikatakan bahwa Pancasila tak lain adalah "pengejawantahan Budi Nurani Manusia".³

1 Lebih lanjut lihat A.P. d'Entreves, *Natural Law* (London, 1972), khususnya hal. 22-35; dan H.L.A. Hart, *The Concept of Law* (London, 1972), hal. 181-207

2 Lihat J.V. Dolan, "Natural Law and Legislation", *Laval Quarterly for Theology and Philosophy*, 16 (1960), hal. 237-264

3 Lihat *Himpunan Ketetapan-ketetapan MPRS Disertai UUD 1945* (Jakarta: Pantjuran Tujuh, 1969), hal. 47

Namun dalam hubungan ini perlu dicatat, bahwa kelima sila Pancasila itu belum mengatur seluruh kehidupan manusia, belum seluruh moral dan juga belum seluruh moral yang hidup di Indonesia. Dalam Pancasila disatukan asas-asas moral yang bersifat umum dan relevan bagi hidup kenegaraan. Selain itu kekuasaan negara atas bidang kehidupan yang diatur kelima sila itu tidak penuh, dalam arti bahwa bidang kehidupan manusia itu adalah lebih luas dari pada kekuasaan negara. Makin tinggi nilai manusiawi makin lepas dia dari kekuasaan negara.¹

3. PANCASILA SEBAGAI MORAL PERORANGAN

Pancasila pertama-tama adalah moral perorangan, moral yang mengikat kita masing-masing. Pancasila mengatur sikap dan tingkah laku kita masing-masing terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Ketuhanan Yang Maha Esa), terhadap sesama manusia (kemanusiaan yang adil dan beradab), terhadap tanah air, nusa dan bangsa (kebangsaan atau nasionalisme), terhadap pemerintahan negara (kerakyatan) dan terhadap negara dalam bidang sosial dan ekonomi (keadilan sosial). Semuanya itu bukan semata-mata kewajiban yuridis, tetapi pertama-tama kewajiban moral, atau lebih tepat kewajiban moral yang telah menjadi kewajiban yuridis sebagai akibat penetapannya sebagai dasar negara.

Pancasila sebagai moral individu kiranya dapat *dirumuskan* secara singkat seperti berikut. Sila yang pertama mewajibkan kita untuk mengakui dan memuliakan Tuhan Yang Maha Esa sebagai Pencipta dan tujuan kita baik dalam pikiran dan kata-kata (sembahyang) maupun dalam tingkah laku sehari-hari (hidup susila). Sila kedua mewajibkan kita untuk mengakui dan memperlakukan semua dan setiap orang, tanpa membedakan bangsa, keturunan, warna kulit, kelamin dan agama, sebagai sesama manusia, yang memiliki martabat mulia dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban asasi. Kita wajib bertindak secara adil dan beradab terhadapnya. Sila ketiga mewajibkan kita untuk menjunjung tinggi dan mencintai tanah air, bangsa dan negara Indonesia, ikut memperjuangkan kepentingan-kepen-

1 Lihat N. Drijarkara, "Pancasila dan Religi", *Kumpulan Karangan* (Yogyakarta), hal. 158-160

tingannya, dan mengambil sikap yang solider serta loyal terhadap sesama warga negara kita. Sila keempat mewajibkan kita untuk ikut serta dalam kehidupan politik serta pemerintahan negara, paling tidak secara tidak langsung, bersama-sama dengan semua sesama warga negara atas dasar persamaan tanggung jawab dan hak atas hasilnya. Akhirnya sila kelima mewajibkan kita untuk memberikan sumbangan kita yang wajar sesuai dengan kemampuan dan kedudukan kita kepada negara demi terwujudnya kesejahteraan umum atau kesejahteraan lahir batin selengkap mungkin bagi seluruh rakyat. Sila ini melarang kita menggelapkan atau meningkari sumbangan kita dan menyerobot suatu bagian di luar proporsi dari kekayaan hasil usaha bersama, dan di lain pihak mewajibkan kita untuk melaksanakan hukum negara dan ikut memperjuangkan agar semua warga, khususnya yang lemah, mendapatkan bagian yang wajar dari kesejahteraan umum untuk mewujudkan kesejahteraan pribadi dan keluarga tanggungan mereka masing-masing.¹

4. PANCASILA, SEBAGAI MORAL NEGARA

Penetapan Pancasila menjadi dasar negara berarti bahwa moral Pancasila juga menjadi moral negara. Sebagai konsekwensinya *negara tunduk kepada moral*, tidak boleh melanggarnya, wajib mengamalkannya dan memajukan pengamalannya oleh rakyat. Moral menjadi norma tindakan-tindakan negara dan sehubungan dengan itu *dituangkan dalam perundang-undangan*. Dengan perkataan lain, moral Pancasila menjadi pembimbing dalam membuat undang-undang yang mengatur kehidupan negara, menetapkan lembaga-lembaga negara dan tugas mereka masing-masing, hak-hak dan kedudukan warga negara, hubungan antara warga negara dan negara dan sebaliknya. Akan tetapi hal ini tidaklah berarti, bahwa seluruh moral harus dituangkan dalam undang-undang. Tidak semua norma moral harus ataupun dapat dijadikan norma yuridis, antara lain karena Pancasila mencakup sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yang pada intinya mewajibkan negara untuk menghormati martabat dan hak-hak asasi manusia, termasuk

¹ Lihat Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, *Himpunan Ketetapan-ketetapan MPR 1978* (Jakarta : Pantjuran Tujuh, 1978), hal. 54-57

kebebasan-kebebasannya. Norma moral dapat ditetapkan menjadi norma hukum positif sejauh norma itu mengatur tindakan-tindakan lahiriah yang menyangkut orang lain, sedangkan soal-soal batin adalah di luar kompetensi dan jangkauan negara serta hukumnya.¹ Dalam hubungan ini dapat dikatakan, bahwa dalam bidang kehidupan batin hanya berlaku norma-norma moral, sedangkan dalam bidang kehidupan lahiriah yang menyangkut hak-hak orang lain dapat dan harus berlaku pula norma-norma hukum sebagai pelaksanaan dan pengukuhan norma-norma moral tersebut. Larangan membunuh orang tak bersalah misalnya adalah pertama-tama suatu norma moral, tetapi karena menyangkut tindakan lahiriah yang melanggar hak asasi orang lain atas hidup, dapat dan wajib ditetapkan menjadi larangan yuridis dan dikukuhkan dengan sanksi-sanksi hukum.

Demikian pula halnya dengan sila-sila Pancasila. Negara wajib mengamalkan dan melaksanakannya, tetapi tidak dapat menetapkan semua kewajiban moral yang mengalir dari sila-sila itu menjadi kewajiban yuridis. Dalam hal ini kekuasaan negara terbatas pada kewajiban-kewajiban moral yang mengatur tindakan-tindakan lahiriah yang menyangkut hak-hak orang lain.² Misalnya negara dapat menghukum orang yang memeras atau menindas orang lain, tetapi tidak dapat menjatuhkan hukuman atas seorang yang ingin memeras orang lain tetapi karena berbagai faktor tidak jadi melakukannya, atau atas seorang yang tidak bersembahyang, sekalipun sembahyang adalah suatu kewajiban yang mengalir dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

Akan tetapi negara juga *berkepentingan dengan pelaksanaan Pancasila sebagai moral perorangan*. Makin baik para warga negara mengamalkan Pancasila atas keyakinannya sendiri, makin terjamin pula pelaksanaan Pancasila yang dituangkan dalam perundang-undangannya. Sehubungan dengan itu negara dapat dan sampai batas-batas tertentu juga wajib ikut membina atau memajukan hidup susila rakyat dengan memberikan anjuran serta bimbingan dan menciptakan suasana di

1 Lihat Ernest Barker, *Principles of Social and Political Theory* (London, 1967), hal. 117-118

2 Lihat MacIver, *The Modern State* (Oxford, 1966), hal. 5, 21

mana moral atau budi pekerti luhur dapat dijalankan dengan mudah.¹ Oleh sebab itu dalam Penjelasan Umum UUD 1945 ditandaskan bahwa "Undang-undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan Pemerintah dan lain-lain penyelenggara Negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur".²

Seperti diuraikan di atas, penetapan Pancasila menjadi dasar negara berarti bahwa moral bangsa menjadi moral negara, dan bahwa oleh sebab itu negara wajib mengamankan dan melaksanakannya. Tetapi arti Pancasila sebagai moral bangsa dan Pancasila sebagai moral negara tidak selalu sama. Arti Pancasila sebagai moral bangsa adalah umum, juga memuat artinya sebagai moral negara yang bersifat khusus. Menetapkan Pancasila sebagai moral negara berarti mengkhususkan artinya. Misalnya Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai moral bangsa berarti sikap manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diungkapkan dalam sembahyang, ibadat dan ketaatan, sedangkan sebagai moral negara berarti bahwa negara atas dasar pengakuan bahwa bangsa Indonesia percaya pada Tuhan Yang Maha Esa wajib "menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu" (pasal 29 ayat 2 UUD 1945), membina toleransi berdasarkan sikap saling menghormati dan kerukunan antara sesama umat beragama dan berkepercayaan, dan menjalankan tugasnya memajukan kesejahteraan umum sebagai tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.³

Pancasila sebagai moral negara kiranya dapat *dirumuskan* secara singkat seperti berikut. Ketuhanan Yang Maha Esa mewajibkan negara untuk menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk bergama dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya, membantu hidup ber-Ketuhanan rakyat dengan

1 Lihat Ernest Barker, *op. cit.*, hal. 119, 123, 132

2 Dikutip dari *Himpunan Ketetapan-ketetapan MPRS Disertai UUD 1945* (Jakarta : Pantjuran Tujuh, 1969),

3 Lihat Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, *Himpunan Ketetapan-ketetapan MPR 1978* (Jakarta : Pantjuran Tujuh, 1978), hal. 111

menciptakan suasana yang baik, memajukan toleransi dan kerukunan antara sesama umat beragama dan berkepercayaan dan menjalankan tugasnya sebagai bakti terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab mewajibkan negara untuk mengakui dan memperlakukan semua orang sebagai manusia yang dikaruniai martabat luhur dan hak-hak asasi, serta semua negara sebagai sesama warga umat manusia, dan bersama-sama membangun dunia baru yang lebih baik berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Persatuan Indonesia mewajibkan negara untuk membela, mengembangkan dan menghayati Indonesia sebagai satu negara nasional, membina dan menjunjung tinggi kebudayaan serta kepribadian nasional, dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan nasional. Kerakyatan mewajibkan negara untuk mengakui kedaulatan rakyat dan mengusahakan agar rakyat melaksanakan kedaulatannya itu dengan memilih wakil-wakil mereka untuk MPR dan DPR, melalui MPR ikut menentukan garis-garis besar haluan negara dan mengeluarkan ketetapan-ketetapan serta memilih Presiden dan Wakil Presiden, dan melalui DPR ikut membuat peraturan-peraturan perundangan dan menetapkan anggaran negara, serta mengawasi pelaksanaannya, mengadakan kritik yang membangun di mana dan sejauh perlu, lagi pula mewajibkan negara untuk mendengarkan suara rakyat dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan rakyat. Akhirnya keadilan sosial mewajibkan negara untuk mengikutsertakan seluruh rakyat dalam kehidupan ekonomi dan sosial, membagi beban dan hasil usaha bersama semua warga negara secara proporsional sambil memperhatikan secara istimewa mereka yang lemah kedudukannya untuk mencegah kesewenang-wenangan dari yang kuat guna menjamin adanya keadilan. Pendeknya mengusahakan agar semua warga negara ikut dalam kegiatan ekonomi serta pembangunan dan mendapat bagian hasilnya yang wajar. ¹

Secara demikian sila pertama mengatur kewajiban negara terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sila kedua kewajiban negara terhadap semua orang dan semua negara lain, sila ketiga

1 Lihat Ali Moertopo, *Strategi Politik Nasional* (Jakarta : CSIC, 1974), hal. 150-156

kewajiban negara terhadap Indonesia sebagai kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam, sila keempat kewajiban negara terhadap semua warganya dalam bidang politik dan pemerintahan, dan sila kelima kewajiban negara terhadap semua warganya dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. Akan tetapi juga di sini harus diperhatikan bahwa kelima sila itu dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena merupakan *suatu kesatuan yang bulat* seperti ditandaskan oleh Presiden Soeharto : "Pancasila merupakan lima dasar yang merupakan satu totalitas, yang merupakan satu kebulatan yang tunggal, yang tiap-tiap sila selalu harus mengandung keempat sila yang lain. Tiap-tiap sila tidak boleh dilepaskan dari sila yang lain; tiap-tiap sila tidak boleh dipertentangkan terhadap sila yang lain, lebih-lebih karena di antara sila-sila itu memang tidak ada hal-hal yang bertentangan".¹

5. KESIMPULAN

Pada hakikatnya Pancasila adalah budi pekerti atau moral, moral bangsa Indonesia, yang dengan tepat dapat disebut moral Pancasila untuk membedakannya dari moral-moral lain. Moral Pancasila ini adalah bagian penting dari pandangan hidup bangsa Indonesia dan biasanya bahkan disebut sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ini telah berabad-abad lamanya berakar dan hidup dalam hati sanubari, watak, kepribadian dan pergaulan hidup bangsa Indonesia, lagi pula mengendap dalam adat-istiadat, pranata-pranata dan lembaga-lembaga sosial. menjelang dan sesudah Proklamasi Kemerdekaan pandangan hidup bangsa ini dimurnikan dan dipadatkan menjadi dasar falsafah atau ideologi Negara Indonesia Merdeka, dan secara demikian menjadi *sumber tertib negara* dan *sumber tertib hukumnya* serta jiwa seluruh kegiatan negara dalam segala bidang kehidupannya. Dengan demikian Pancasila adalah *mahapenting* dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia seperti ditandaskan oleh

¹ Pidato pada Peringatan Hari Lahirnya Pancasila di Jakarta, 1 Juni 1967, dalam Krissantono, Ed., *Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila* (Jakarta : CSIS, 1976), hal. 26

Presiden Soeharto: "Karena Pancasila merupakan *pandangan hidup* kita, maka Pancasila itu pun menjadi tuntutan hidup dan tujuan hidup Bangsa Indonesia ; ia menjadi *sumber tertib sosial*, ia menjadi *sumber tertib seluruh perikehidupan kita*, baik sebagai individu, maupun dalam ikatan golongan, ikatan Partai Politik, ikatan Organisasi, ia merupakan *sumber tertib negara* dan *tertib hukum* serta harus menjadi *pedoman* dan *dilaksanakan Pemerintah*, semua *aparatnya* dan oleh *setiap pejabat* dalam melaksanakan kekuasaan serta tugasnya".¹

Pancasila dan penjabarannya dalam UUD 1945, asal dipahami, dihayati dan diamalkan atau dilaksanakan dalam segala segi kehidupan dalam tata pergaulan Bangsa Indonesia secara murni dan konsekwen sesuai dengan perjuangan Orde Baru, merupakan *jaminan bagi tercapainya tujuan-tujuan nasional*, khususnya terwujudnya "suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila" yang pada gilirannya akan memungkinkan setiap warga bangsa dan negara hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya dan mencapai kesejahteraan lahir dan batin sesempurna mungkin. Pelaksanaan Pancasila dalam hidup kenegaraan berarti, bahwa kepentingan-kepentingan negara dan kepentingan-kepentingan pribadi semua warga negara mendapatkan perhatian yang wajar dalam suatu keseimbangan yang tepat. Sebagai konsekwensinya akan terjamin kepastian hukum dan tersedianya barang-barang dan jasa-jasa keperluan hidup yang terjangkau oleh daya beli rakyat banyak. Oleh sebab itu Pancasila harus dipertahankan sekuat tenaga dan yang lebih penting lagi dipahami dan dilaksanakan secara murni dan konsekwen.

¹ Ibid.

MENUJU SISTEM EKONOMI PANCASILA

Christianto WIBISONO

Proklamator Bung Hatta dalam ceramah pada peringatan hari lahirnya Pancasila 1 Juni 1977 menyatakan dengan tegas : "Camkanlah, negara Republik Indonesia belum lagi berdasarkan Pancasila, apabila Pemerintah dan masyarakat belum sanggup mentaati Undang-Undang Dasar 1945, terutama belum dapat melaksanakan pasal 27 ayat 2, pasal 31, pasal 33 dan pasal 34."

Penulis akan membahas masalah sistem ekonomi yang seyogyanya mencerminkan watak dan jiwa yang terkandung dalam falsafah Pancasila. Sistem ini berkaitan dan hanya dimungkinkan tumbuh sehat dalam Sistem Politik yang juga harus dijiwai oleh falsafah Pancasila. Tentang Sistem Politik lebih tepat diuraikan dalam naskah tersendiri/terpisah. Marilah kita coba pikirkan suatu kerangka Sistem Ekonomi Pancasila.

Patokan pertama yang harus kita pegang adalah bahwa kita tidak bisa menghindar dari hukum alam berupa teori bandul/pendulum. Bangsa dan negara Indonesia pada tahun 1960-1965 menaiki mobil yang kemudinya dibanting ke kiri oleh sopirnya sampai terperosok ke lembah kemerosotan ekonomi. Secara refleksi mobil Republik kemudian dibanting ke kanan. Secara obyektif harus diakui, bahwa bila kita telah memutar setir ke kiri, untuk mengembalikan ke tengah, harus dibanting ke kanan sekuat tenaga. Dalam proses inilah secara tidak disengaja kita terlanjur menyeleweng ke kanan. Secara realistis kita harus mengakui bahwa dibutuhkan bantuan luar negeri untuk meng-

ungkit ekonomi Republik yang sangat merosot dan mengembalikannya pada tingkat yang normal.

Karena itu demi obyektivitas yang tidak memihak dan tidak a priori mengkritik Pemerintah, kita harus memperbaiki dan menemukan jalan ke luar yang baik dalam mengembalikan rel perekonomian kita ke jalan yang benar, jalan lurus di tengah, yaitu jalan Pancasila. Kita tidak perlu terlalu mencari kambing hitam dan menyalahkan pihak lain padahal sebagian dari kita juga sudah ikut mengecap hasil dari politik pembangunan ekonomi kita yang sekarang ini.

Dalam memberikan koreksi dan kritik inilah, maka kita harus tetap berpegang kepada prinsip mendahulukan kepentingan nasional di atas segala-galanya. Sekalipun tidak dalam kerangka konfrontatif seperti di masa lalu, kita harus sadar bahwa ekonomi nasional kita sebagaimana ekonomi dari negara-negara berkembang lainnya, dihadapkan kepada tantangan serius modal asing, ketergantungan teknologi dan pasaran serta pengaruh pola konsumsi tinggi dari negara-negara industri. Tidak ada orang yang akan menolong kita kecuali diri kita sendiri. Kita harus memperkuat terus-menerus posisi tawar-menawar kita dengan memberikan bobot kepada kekuatan yang kita miliki. Ketahanan Nasional di segala bidang memang diperlukan, terlebih lagi di bidang ekonomi, sebab justru disinilah perjuangan sekarang sedang berlangsung antara modal dan kekuatan ekonomi nasional dalam persaingan dengan modal dan teknologi asing yang berskala raksasa.

Marilah kita bahas semua itu dengan mendalam.

I. EKONOMI INDONESIA SEBAGAI BAGIAN EKONOMI DUNIA

Apabila kita berbicara tentang ekonomi Indonesia, maka orang tidak bisa mengingkari bahwa ekonomi Indonesia haruslah merupakan bagian aktif dan inheren dalam struktur ekonomi dunia. Istilah autarki yang bersifat teoritis dalam ilmu

ekonomi abad XIX jelas sudah tidak mungkin lagi, sekalipun diganti dengan istilah berdikari. Suatu sistem ekonomi dunia menganut asas ketergantungan atau interdependency. Yang maksimal harus kita usahakan adalah agar ketergantungan itu sifatnya simetris dan tidak terlalu timpang atau a-simetris.

Sebagai contoh, kita boleh saja tergantung dari Jepang untuk jenis barang tertentu misalnya mesin, asal kebalikannya Jepang juga tergantung dari kita untuk bahan baku. Tingkat ketergantungan serupa ini disebut symmetrical interdependency. Sebaliknya, bila ternyata hanya Indonesia yang bergantung kepada Jepang, tapi Jepang sendiri bisa hidup terus tanpa Indonesia, maka itu berarti kita berada pada hubungan kritis, a-symmetrical interdependency. Posisi kita berarti sangat lemah, sebab Jepang tidak memerlukan kita sebagaimana kita memerlukan Jepang.

Hal inilah yang harus kita camkan, yaitu usaha peningkatan daya mampu ekonomi nasional kita agar kita bisa meningkatkan terus-menerus potensi ekspor kita agar kita tidak terlalu tergantung kepada pasaran tertentu. Dalam perekonomian dunia sekarang ini sekalipun RRC tidak mampu mengisolir diri dan sudah melepaskan semboyan autarki yang tidak mungkin dicapai oleh negara manapun. Kita harus waspada agar usaha memperbaiki penyimpangan dalam politik ekonomi kita tidak menjurus kepada sesuatu yang ekstrem pula. Autarki dan berdikari sudah usang dan tidak tepat lagi. Yang penting adalah peningkatan ketahanan ekonomi nasional dan mengurangi tingkat ketergantungan sampai kepada suatu derajat yang berimbang dalam hubungan ekonomi kita dengan dunia internasional. Jelaslah bahwa dalam situasi interdependensi ini, ekonomi Indonesia tidak mungkin mengisolir diri secara kaku atau secara ekstrem dalam menghadapi modal asing.

Dalam mengadakan manouvre antara sistem ekonomi terbuka dan usaha meningkatkan ketahanan ekonomi nasional Indonesia inilah seluruh dana dan tenaga harus dikerahkan dalam rangka kepentingan nasional. Swasta nasional harus dibantu tapi juga harus membantu pemerintah. Pemerintah memerlukan dukungan dan partisipasi masyarakat untuk pe-

ningkatan ketahanan ekonomi nasional. Masyarakat mengharapkan agar akses dari sistem ekonomi terbuka dengan persaingan bebas yang mempersempit ruang gerak pengusaha kecil seyogyanya diawasi dan dibatasi oleh pemerintah.

Selain itu, karena faktor kelangkaan modal maka kita juga harus hemat dan efisien. Penghamburan dan pemborosan seperti yang disinyalir Prof. Dr. Soemitro, waktu itu Menteri Riset, baik karena kealpaan maupun karena korupsi, dari potensi ekonomi nasional harus dihindarkan. Ini mengingatkan kita masih membutuhkan terus mengalirnya bantuan luar negeri apabila kita ingin mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi seperti yang dialami selama tujuh tahun terakhir. Hal itu berarti bahwa problem pembagian porsi antara modal asing dan nasional akan tetap merupakan masalah aktual di masa mendatang, sampai potensi nasional kita mampu menggantikan posisi modal asing. Disinilah pentingnya perencanaan pemerintah untuk menjamin proses pemupukan dan pembinaan modal nasional dalam peralihan struktur permodalan dari ekonomi Indonesia.

Pemerintah melalui penyesuaian peraturan mengenai penanaman modal sebetulnya telah mulai mengadakan pembatasan dan pengawasan dari peranan modal asing. Sebaliknya penanaman modal dalam negeri telah digalakkan dan dirangsang, walaupun timbulnya masalah latent (pribumi dan non pribumi) juga mengakibatkan hambatan dalam perkembangan investasi oleh modal nasional.

Tentang kebutuhan modal dari luar negeri ini angka yang tersedia barulah mengenai taksiran kebutuhan modal selama Pelita II. Menurut Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Drs. Barli Halim, maka selama Pelita II, dengan target pertumbuhan GDP sebesar 7,5 % per tahun, diperlukan investasi sebesar Rp. 11,4 trilyun atau US \$ 28 milyar. Dari jumlah itu sekitar Rp. 8.200 milyar dipenuhi oleh tabungan dalam negeri, sisanya sebesar Rp. 3.200 milyar atau US \$ 8 milyar merupakan bantuan luar negeri. Dengan demikian rata-rata setiap tahun selama masa Pelita II saja dibutuhkan US\$ 1,6 milyar modal luar negeri. Diperkirakan sejumlah US\$ 1 milyar akan disediakan melalui bantuan pemerintah (atau Official

Development Assistance) dari negara-negara sahabat kepada RI. Sisanya sejumlah US \$ 600 juta masih harus dipenuhi dari penanaman modal swasta asing ke Indonesia.

Apabila taksiran kebutuhan modal dari luar negeri untuk masa Pelita II kita pakai sebagai pegangan untuk memperoleh tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 7,5% rata-rata per tahun, untuk jangka pendek bahkan sampai di tahun 2000 pun ekonomi kita masih harus memperoleh tunjangan modal asing. Hal ini mengingat skenario pertumbuhan ekonomi Indonesia, suatu proyek penelitian yang dipimpin oleh Dr. Thee Kian-wie, mengisyaratkan suatu alternatif pertumbuhan ekonomi sebagai berikut :

I.	1973 — 1980 : 7,35 %	II.	1973 — 1980 : 7,35 %	III.	1973 — 1980 : 7,35 %
	1980 — 1990 : 6,30 %		1980 — 1990 : 7 %		1980 — 1990 : 7,5 %
	1990 — 2000 : 6 %		1990 — 2000 : 7 %		1990 — 2000 : 8 %

Oleh Prof. Dr. Soemitro dianggap bahwa alternatif II merupakan laju yang realistis yang dapat dicapai (realizable) dari alternatif III sebagai suatu tingkat yang seyogyanya kita capai (desirable). Alternatif I jelas merupakan satu kemunduran dan kemerosotan tingkat pertumbuhan ekonomi yang harus dihindarkan jika kita tidak menginginkan ketegangan sosial. Proyek penelitian yang diadakan di bawah pengawasan Menteri Negara Riset dan dikepalai Dr. Thee Kian-wie ini sekarang masih dalam proses dan data maupun rekomendasinya belum siap untuk diketahui umum. Karena itu untuk sementara kita harus puas dengan asumsi bahwa tampaknya sampai tahun 2000 pun kita masih tetap membutuhkan bantuan luar negeri. Hanya saja, barangkali akan diusahakan untuk selanjutnya sifat komplementernya yang menonjol, sifat pelengkapannya dan bukan peranan dominan dari modal asing itu dalam perekonomian nasional kita.

Dengan demikian jelaslah bahwa untuk masa seperempat abad mendatang dunia usaha Indonesia secara obyektif masih harus meningkatkan kemampuannya secara terus-menerus, di samping harus belajar hidup berdampingan dengan modal asing yang peranannya tidak bisa kita abaikan.

Kita tidak perlu membuka perdebatan bertele-tele tentang pro dan kontra modal asing. Kita tidak perlu terlalu sloganistik mengadakan kampanye tentang usaha berdiri di atas kaki sendiri dan seterusnya apabila fakta yang berdasarkan data dan analisa kuantitatif yang konkrit memang mengharuskan kita untuk mengadakan symbiose dengan mekanisme ekonomi internasional. Berbicara tentang mekanisme ekonomi internasional maka faktor kekuatan modal dan teknologi sungguh-sungguh merupakan hal yang sangat sulit untuk dimanipulir.

Negara-negara sosialis pun dewasa ini sedang berbelanja secara besar-besaran di pasar modal dan teknologi dunia industri Barat. Ini tidak bisa dipungkiri oleh slogan ideologis yang kosong belaka. Kredit jangka panjang meliputi bermilyar dollar mengalir dari Jerman Barat, Jepang dan bahkan Amerika Serikat ke negara-negara Eropa Timur. Suatu ironi bagi perjuangan negara berkembang yang selalu menghantam dunia Barat dan memuja negara sosialis. Ternyata negara sosialis pun justru ikut memperebutkan fasilitas kredit dan investasi teknologi Barat yang mutlak diperlukan oleh negara berkembang.

Dalam pecaturan politik ekonomi internasional yang demikian itulah kita harus selalu mengadakan evaluasi yang serius dan mendalam terhadap strategi kita dalam mengemudikan kendali politik luar negeri dan politik kerjasama ekonomi kita.

Tampaknya memang kita selalu dihadapkan kepada dilemma-dilemma yang sangat pelik. Di satu pihak kita ingin menumbuhkan ketahanan ekonomi nasional, di lain pihak kita tidak bisa mengingkari ciri dunia saat ini, saling ketergantungan satu sama lain; persaingan yang Machiavelistis antara sesama negara berkembang serta kelemahan-kelemahan lain yang dieksploitar oleh kekuatan modal internasional.

Apabila kita mendalami dengan saksama posisi Indonesia sebagai bagian ekonomi dunia dengan ciri ketergantungan dan persaingan bebas, maka kita harus berusaha terus-menerus meningkatkan ketahanan ekonomi nasional kita agar kita mengurangi hubungan ketergantungan yang timpang serta sukses dalam persaingan internasional.

Jelaslah bahwa pandangan ekstrem untuk melarang atau menghentikan arus modal asing, selain hanya berbau slogan kiri juga tidak realistis menghadapi situasi dunia yang sudah berubah dibanding tahun 1960-an.

Apabila di bagian depan kami menyebut perlunya penyesuaian kemudi dari politik ekonomi nasional kita maka jelaslah bahwa kemudi ini tidak boleh dibanting lagi secara ekstrem ke pojok kiri. Sekarang kita harus membantu pemerintah untuk melempangkan kemudi yang meluncur ke kanan. Kita kembalikan ke tengah, ke jalan yang benar. Tapi harus waspada betul-betul, supaya kita tidak mengulangi kekeliruan atau gerak refleks yang berlebihan. Dari kecenderungan kanan menjadi tergelincir ke kiri.

Konkritnya, setelah kita memperhatikan dan mempelajari kelemahan-kelemahan dari arus masuknya modal asing ke dalam negeri, maka kita harus mengadakan pengawasan dan pembatasan serta pengaturan yang ketat tanpa menjadi ekstrem dan mengambil alih, mengusir atau menolak sama sekali unsur komplemen yang masih mutlak dibutuhkan itu. Terlebih pula mekanisme kerjasama internasional, mekanisme ekonomi dunia dewasa ini sedang menuju ke arah pengaturan saling ketergantungan ke arah usaha penyesuaian diri yang saling menguntungkan baik bagi negara industri maupun negara berkembang. Negara sosialis pun tidak mampu mengembangkan autarki. Pola perdagangan negara-negara sosialis pun membuktikan bahwa mereka membutuhkan hubungan dagang dan kerjasama ekonomi dengan negara Barat. Alternatif yang lain tentu saja bisa, tapi sudah usang dan menjadi tidak wajar seperti Kamboja sekarang atau Albania. Suatu isolasi yang sangat ketat bahkan tidak berperikemanusiaan. RRC sendiri dalam taraf pembangunannya sekarang mau tidak mau harus mengadakan interaksi dengan mekanisme ekonomi internasional. Suka atau tidak suka, Maoisme harus berdialog dengan gembong-gembong multinational corporation untuk mendapatkan teknologi barang industri mutakhir.

Karena itu dalam situasi makro seperti ini, pengusaha Indonesia pun harus siap dengan pikiran dan tenaganya untuk

menyumbangkan kemampuan mereka dalam meningkatkan ketahanan ekonomi nasional menghadapi tantangan multinational corporation dan kekuatan ekonomi negara-negara besar. Sekedar menyalahkan pemerintah dan menuntut perlindungan berlebihan tanpa menunjukkan prakarsa dan sumbangan pikiran tentang bagaimana menghadapi kekuatan ekonomi asing untuk dijinakkan dan dimanfaatkan bagi peningkatan daya mampu ekonomi nasional kita, adalah kekeliruan yang harus ditinggalkan. Sekarang kita harus mampu menunjang pemerintah menghadapi tantangan situasi internasional.

II. ANALISA PERBANDINGAN SISTEM EKONOMI

Pasal 33 Undang-undang Dasar 45 secara gamblang menyebut ekonomi negara kita menganut sistem kekeluargaan. Sayang sekali mengingat kondisi lahirnya konstitusi kita, elaborasi yang lebih mendetail dari pasal tersebut belum sempat kita adakan, bahkan sampai kita memasuki usia 32 tahun sekarang ini. Semuanya itu tidak perlu dicari kambing hitamnya. Sistem Ekonomi Pancasila memang tidak bisa direalisasi hanya melalui slogan dan bibir belaka. Ia menuntut persyaratan-persyaratan konkrit, perubahan-perubahan fundamental dari pola berpikir usang dan klasik, dan memerlukan adanya kemauan politik untuk merombak piramida struktur sosial ekonomi kita. Piramida ini merupakan struktur warisan kolonialisme Belanda. Perjuangan kemerdekaan yang harus diteruskan dengan pengisian kemerdekaan sebetulnya dapat dilukiskan dengan pernyataan lain, yaitu setelah perjuangan melawan penjajahan politik berakhir, dengan kemerdekaan Indonesia, perjuangan melawan penjajahan ekonomi berupa ketergantungan yang berlebihan dari sistem ekonomi nasional kita pada unsur asing harus diteruskan ke arah kedaulatan ekonomi.

Tetap berpegang kepada realitas bahwa kita harus saling bekerjasama dan saling merasakan ketergantungan tidak berarti bahwa kita harus sekedar 'nrimo' dengan keadaan yang masih timpang dalam kehidupan ekonomi kita. Kita realistis, karena itu kita tidak anti modal asing. Tapi kita juga realistis bahwa ekonomi kita masih 'vulnerable' terhadap faktor ekstern dan asing, karena itu kita harus terus-menerus meningkatkan ketahanan ekonomi kita.

Pada skala nasional kita harus merombak piramida struktur sosial ekonomi kita agar kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Bukan sekedar di bidang film atau pers, tapi juga dalam kedaulatan ekonomi. Karena itu apabila secara realistis kita melihat bahwa bidang-bidang ekonomi yang padat modal seperti pertambangan dan industri berat masih harus ditangani modal asing, kita wajib merencanakan pola pengalihan, baik dari segi kepemilikan dan permodalan maupun teknologi dan managementnya. Apabila di masa lampau ekonomi Indonesia di puncaknya dimonopoli oleh perusahaan raksasa Hindia Belanda (The Big Five dan kawan-kawan), kemudian di tengah piramida sebagai 'buffer' ditempatkan pedagang perantara golongan Cina dan baru di dasar piramida golongan pribumi, maka sekarang ini harus dicegah re-inkarnasi dari piramida ekonomi kolonial itu kembali.

Apabila jalan Thamrin dan jalan Jenderal Sudirman di Jakarta ternyata kelak hanya merupakan markas dari kegiatan multinational corporation belaka, tanpa mampu memberikan kesempatan kepada perusahaan nasional secara wajar menduduki 'posisi jantung ekonomi Indonesia itu', maka itu berarti sudah komplitlah sirkulasi dari kembalinya struktur ekonomi kolonial. Kalau dulu hanya perusahaan Belanda, sekarang multinational corporation menggantikan peranan mereka.

Semua ini harus diatasi, bukan sekedar dengan kebencian dan tindakan hantam kromo. Masalah modal barangkali bisa kita atasi dengan kredit, teknologipun kita bisa membeli, tapi masalah sikap mental berusaha inilah yang harus ditumbuhkan, diperluas secara intensif dan ekstensif sekali. Dalam perjuangan Irian Barat, Presiden Soekarno almarhum telah mengambil alih modal Belanda tanpa persiapan aparaturnya dan ketrampilannya sama sekali. Hasilnya sangat mengecewakan, belasan perusahaan negara yang mewarisi jaringan dagang kolonial yang paling hebat di negara ini ternyata tidak mampu memelihara atau melanjutkan, bahkan jaringan distribusi itu hancur sama sekali. Kita tidak menghendaki politik hantam kromo demikian yang merugikan konsumen rakyat jelata dan seterusnya justru melemahkan potensi ekonomi Indonesia keseluruhan.

Pemerintah telah mengusahakan perbaikan dalam perundang-undangan penanaman modal dengan memberikan perangsang kepada pengusaha nasional. Bahkan untuk mengatasi masalah sosiologis dari problem latent, yaitu golongan non pribumi, pemerintah pun secara sadar memberikan fasilitas khusus untuk mengangkat golongan pribumi. Itikad baik pemerintah untuk mengoreksi penyimpangan akibat masuknya modal asing sudah ditunjukkan. Sekarang justru pengusaha harus memperbaiki diri untuk memanfaatkan kelonggaran-kelonggaran yang telah diberikan pemerintah agar bisa mengambil alih secara bertahap peranan modal asing yang masih dominan di beberapa sektor kehidupan ekonomi kita.

Sebelum kita memasuki lebih lanjut masalah sikap mental tersebut yang akan menyangkut pembahasan filosofis terhadap dunia usaha, baiklah kita kembali menelaah masalah ruang lingkup dari usahawan kita, yaitu dalam struktur ekonomi Pancasila.

Konsultan Bank Dunia, Dr. Mahbub ul Haq yang pernah menjadi arsitek ekonomi Pakistan selama Ayub Khan berkuasa, setelah mempelajari masalah-masalah negara berkembang mengambil suatu kesimpulan yang dramatis.

Dua hal yang menonjol dari kesimpulan itu merupakan satu rangkaian yang berkaitan. Pertama, ialah kecenderungan negara berkembang untuk secara sloganistik menyebut sistem ekonomi mereka sebagai sistem ekonomi campuran, sistem ekonomi sosialis yang berkepribadian, yang tidak menganut liberalisme Barat dan komunisme blok Timur. Celakanya, menurut Mahbub ul Haq, dalam menciptakan sistem yang disebut campuran dan berkepribadian itu, dengan mencangkok dari kedua belah pihak, ternyata secara tidak disengaja atau tidak dimengerti telah tercangkok dari kedua sistem hal-hal yang buruk dan ekstrem jelek saja. Efek-efek negatif dan ekseseks buruk dari kedua sistem itulah yang telah menjerumuskan negara berkembang ke dalam lingkaran setan ketidak-mampuan untuk 'take off'. Kondisi negara berkembang yang belum mapan aparatur dan mekanisme birokrasinya telah menjerumuskan negara berkembang kepada ekonomi keluarga, di mana hanya beberapa

puluh kelompok keluarga saja yang menikmati pembangunan ekonomi. Kombinasi feodalisme dengan kapitalisme yang tidak segera diimbangi dengan pengawasan dan pembatasan ketat. Atau pengawasan dan pembatasan itu macet karena kurang tegasnya penguasa setempat dalam menerapkan prinsip negara hukum. Akibatnya, kata Mahbub ul Haq, sekalipun Ayub Khan berbicara tentang Sosialisme Islam, yang muncul adalah oligarki politik dan ekonomi yang menjadi sebab musabab ketidak-puasan dan pecahnya revolusi Bangla Desh.

Karena kepahitan pengalamannya inilah, Mahbub ul Haq kemudian menyimpulkan bahwa dalam alam pembangunan negara berkembang yang memiliki penduduk dalam jumlah raksasa, sistem pembangunan yang terbaik untuk jangka panjang adalah sistem mobilisasi RRC.

Kita tidak perlu sependapat dengan Mahbub ul Haq, tapi analisisnya patut kita kaji dengan saksama. Kita harus berani mawas diri dan melihat kepada diri kita sendiri, tentang akibat sampingan dari proses pembangunan ekonomi kita saat ini. Bahwa ide pemerataan pendapatan adalah juga ide yang universal, yang tidak mungkin diabaikan begitu pula di Indonesia. Bahwa koreksi harus segera diadakan untuk mencegah akumulasi kekuasaan politik dan ekonomi pada kelompok oligarki tertentu yang bertentangan dengan falsafah Pancasila. Kita harus kritis menilai apakah falsafah Pancasila telah diterapkan, dalam kehidupan sehari-hari dalam mekanisme perekonomian nasional kita.

Sistem Ekonomi Pancasila dengan titik berat kepada keselarasan dan keserasian sebagaimana tersirat dalam istilah 'kekeluargaan' niscaya harus dijabarkan lebih konkrit agar tidak menjadi kabur pengertian maupun penerapannya. Sebagai contoh, sampai di mana sistem koperasi telah dibina dengan baik agar bisa mampu menjadi salah satu unit ekonomi dalam piramida struktur ekonomi kita sebagai salah satu komponen kekuatan ekonomi nasional. Koperasi di Indonesia secara obyektif belum memenuhi selera dan idaman kita. Mereka bahkan ketinggalan dari rekan-rekan koperasi dari negara-negara Barat seperti koperasi pertanian dan peternakan Eropa,

Australia dan Amerika Serikat. Ini suatu ironi dan tragedi bagi bangsa yang berfalsafah Pancasila. Jika kita tidak mampu menghidupkan dan mengkreatifkan unit koperasi kita, maka kita tidak boleh terlalu sering menepuk dada dan berkata bahwa sistem ekonomi kita adalah yang terbaik dan bukan kapitalistis. Sloganisme ini harus diakhiri dan diganti dengan tindakan nyata. Di sini pun dibutuhkan perombakan sikap mental para pengurus koperasi dan warga masyarakat agar management koperasi di tangan mereka yang mampu berprestasi. Kita harus mengubah orientasi dari wadah belaka ke arah substansi positif. Tidak perlu kita malu untuk belajar dari sistem koperasi negara-negara Barat yang telah sukses dan berkembang walaupun di negara tersebut secara resmi berlaku sistem pasaran bebas, kapitalisme liberal yang asli.

Di samping itu mengingat bahwa sistem kapitalisme itu sendiri di negara asalnya telah mempunyai sistem pengawasan dan pembatasan yang mampu menjamin kontinuitas pembangunan bangsa, seyogyanya kita juga mempelajari teknik dan metode penjinakan kapitalisme.

Seratus tahun yang lalu Amerika Serikat sudah melihat gejala eksek dari kapitalisme berupa monopoli yang merugikan kepentingan rakyat banyak. Karena itu diundangkanlah *Anti Trust Act* untuk mencegah terjadinya persekongkolan harga dan monopoli pasar oleh kelompok-kelompok raksasa kaum industrialis AS. Sekalipun kelompok raksasa itu sama-sama satu bangsa dan satu negara, namun prinsip kepentingan umum toh harus didahulukan dan diberi prioritas. Undang-undang Anti Trust ini terus menerus disempurnakan dan disesuaikan dengan kebutuhan, sesuai dengan tahap-tahap perkembangan perekonomian Amerika Serikat. Dengan pelbagai amandemen, Undang-undang itu tetap langgeng sampai detik ini dan telah sering dipergunakan untuk menghukum kaum kapitalis raksasa yang secara naluriah memang cenderung mencari keuntungan maksimal dengan pelbagai cara yang merugikan pihak ekonomi lemah, yaitu masyarakat Amerika keseluruhan.

Dalam hal ini pun kita harus secara jujur mengakui bahwa sistem ekonomi terbuka kita masih mengandung kelemahan-ke-

lemahan. Karena itu untuk membatasi mengawasi dan mengarahkannya agar tidak terjadi penyimpangan yang terlalu jauh perlu segera diadakan usaha ke arah penertiban persaingan yang terlalu bebas antara kekuatan-kekuatan ekonomi yang tidak seimbang di tanah air kita. Sudah tiba waktunya untuk mempelajari dan meninjau kemungkinan diterapkannya Undang-undang Anti Trust yang telah disesuaikan dengan kondisi dan situasi Indonesia.

Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan : "Peraturan yang sama bagi pihak-pihak yang berbeda, sama tidak adilnya dengan peraturan yang berbeda-beda untuk pihak-pihak yang sama kedudukan sosial ekonominya." Ahli hukum yang waktu itu adalah Menteri Kehakiman secara tepat menguraikan asas keadilan apabila dihadapkan kepada kenyataan dan obyek yang berbeda. Untuk menghadapi obyek yang berbeda-beda, niscaya diperlukan peraturan yang berbeda-beda pula, justru untuk menjamin agar tercapai hasil akhir berupa keadilan yang hakiki. Bagi pihak yang tidak memperoleh manfaat atau dikurangi kepentingannya, peraturan sedemikian niscaya dianggap suatu diskriminasi dan karena itu akan menentang peraturan yang tidak seragam. Sebaliknya bagi pihak yang lemah, tanpa peraturan yang diskriminatif, maka jelaslah dalam alam persaingan yang memakai hukum 'the survival of the fittest' mereka akan tersisihkan tanpa kesempatan yang wajar untuk memberikan prestasi mereka.

Justru karena itulah, maka para penegak hukum di Amerika Serikat pun melihat bahwa selain pembatasan kepada kelompok kapitalis monopoli, maka para pengusaha kecil harus dibantu secara konkrit melalui kesempatan yang sengaja disisihkan untuk mereka. Di sana menurut *Small Business Act*, maka perusahaan-perusahaan kecil berhak memperoleh jaminan order bagi pekerjaan-pekerjaan pemerintah. Setiap proyek pemerintah yang nilainya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Small Business Administration dicadangkan hanya untuk perusahaan kecil yang terdaftar. Bila perlu, perusahaan kecil itu langsung dapat memperoleh penunjukan tanpa tender. Perusahaan besar dianjurkan agar membagi order dalam sub-kontrak dan memberi kesempatan kepada perusahaan-perusahaan kecil untuk menjadi

supplier. Ini semua diatur dalam perundang-undangan, sehingga jaminan kelangsungan hidup perusahaan kecil, berkat order yang kontinyu, sangat membantu eksistensi perusahaan kecil di Amerika Serikat.

Hal ini jelas diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang menghendaki agar ekonomi kita disusun atas dasar kekeluargaan. Menurut hemat kami ekonomi kekeluargaan tidak sama dengan ekonomi yang didominasi oleh beberapa keluarga saja, melainkan harus dikuasai oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia sebagai satu keluarga besar.

Demikianlah apabila kita secara dewasa menilai situasi dunia, kondisi makro yang dihadapi Indonesia dalam percaturan ekonomi dan diplomasi internasional, maka kita dapat menarik pelajaran yang berharga untuk memperoleh bekal dalam menghadapi tantangan-tantangan historis perempat terakhir abad ke XX ini.

Sistem Ekonomi Pancasila yang hendak kita anut dan ciptakan masih harus dibentuk. Jangan sampai tidak berbobot dan merupakan wadah kosong belaka, sebab tidak ada substansi yang mengisinya. Bahaya terbesar adalah kelengahan kita sebab terlalu asyik dan sering membohongi diri sendiri dengan slogan yang tidak ada bobot dan wibawanya, sehingga tidak pernah menciptakan Sistem Ekonomi Pancasila, tapi mengambil oper penyakit eksekutif kapitalisme ke dalam tubuh ekonomi kita.

Pembentukan Sistem Ekonomi Pancasila itu harus mempertimbangkan masak-masak segenap faktor yang mempengaruhinya. Kita sebagai bangsa merdeka harus berdaulat di bidang ekonomi. Tapi sebagai bagian dari masyarakat dunia yang telah semakin saling tergantung satu sama lain, kita tidak bisa mengisolir diri. Tugas utama kita ialah meningkatkan ketahanan ekonomi nasional dengan demikian mengurangi dan memelihara batas ketergantungan kita kepada negara lain dalam taraf yang seimbang, yaitu saling membutuhkan, saling bergantung dan saling menguntungkan.

Dalam kerangka besar itulah kita harus segera mengisi Sistem Ekonomi Pancasila dengan pola operasionalnya, terma-

suk usaha pencegahan eksces kapitalisme, usaha pemerataan pendapatan agar dapat menciptakan situasi harmonis dalam masyarakat, melenyapkan ketegangan dan ketidak-adilan sosial yang menjadi sumber ketidak-puasan masyarakat. Selanjutnya pengisian secara nyata Sistem Ekonomi Pancasila dengan struktur yang tidak menimbulkan kontroversi ; pencegahan dominasi perusahaan raksasa asing agar piramida ekonomi tidak kembali seperti masa kolonial ; dan pemberian ruang gerak kepada koperasi untuk berkembang dan berprestasi. Kedua macam perundang-undangan itu boleh dikatakan merupakan penjaga garis yang mengatur agar dalam iklim persaingan bebas sesuai prinsip demokrasi liberal, tidak terjadi hal-hal yang ekstrem berupa monopoli harga dan pasaran oleh kelompok raksasa, serta merajalelanya pengangguran jika perusahaan kecil menjadi bangkrut semua karena tidak mampu bersaing. Dua penjaga garis ini memang jelas mengisyaratkan adanya ketidak-samaan hukum menghadapi obyek yang berbeda, seperti yang dikatakan Prof. Mochtar. Sistem Ekonomi Pancasila kita harus disempurnakan mekanisme kontrolnya agar tidak tergelincir ke arah liberalisme dengan pengaturan semacam itu.

Bagaimana dengan struktur perusahaan negara? Apakah itu buruk? Soalnya tidak sederhana, melainkan kembali kepada faktor mental dan 'entrepreneurship' dari pejabat yang ditugaskan memegang management perusahaan negara. Seluruh birokrat yang memimpin perusahaan negara di negara sosialis adalah manager-manager bibit unggul yang mampu berdebat dan berunding dalam tawar-menawar perdagangan yang rumit dengan rekan-rekan mereka, para direktur perusahaan multinasional Barat. Apabila di negara sosialis, para birokrat perusahaan negara mampu berdedikasi membela kepentingan nasional negara mereka dalam berunding dengan multinational corporation, maka para manager Perusahaan Negara di Negara Pancasila, justru harus membuktikan pula bahwa mereka pun sanggup mengamankan misi penting, yaitu meningkatkan ketahanan ekonomi nasional di bidang yang dipercayakan ke tangan mereka.

Tidak ada yang salah atau dosa dalam struktur perusahaan negara, yang salah adalah managementnya, atau karena tidak

becus atau karena melakukan korupsi yang merupakan masalah di mana saja, dan bukan cuma monopoli perusahaan negara.

Apabila kita mau membantah teori Mahbub maka kita harus segera mengoreksi dan membuktikan bahwa strategi dan Sistem Ekonomi Pancasila walaupun merupakan ekonomi campuran, bukan liberal dan bukan komunis, melainkan cangkokan kedua unsur, kita harus mencangkok yang baik-baik saja. Kalau memang sistem pengawasan eksekutif kapitalisme Amerika Serikat yang memang berlaku di pelbagai negara industri penganut demokrasi liberal cukup efektif, kenapa kita tidak menerapkannya untuk menjinakkan modal asing di Indonesia. Bahkan kalau perlu terhadap modal nasional pun harus diadakan pengarahan agar tidak terlalu cenderung ke arah monopoli.

III. SISTEM EKONOMI PANCASILA

Dari analisa dan studi perbandingan yang telah kita lakukan di atas maka dapat kita rumuskan suatu kerangka besar yang memuat gagasan-gagasan konkrit tentang Sistem Ekonomi Pancasila. Kerangka Besar itu seyogyanya memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Sistem Ekonomi Pancasila berakar, berkiblat dan berdasar pada falsafah bangsa dan negara kita, yaitu Pancasila.
2. Sistem Ekonomi Pancasila merupakan pengejawantahan dan penjabaran dari masing-masing Sila serta mencerminkan keutuhan, kekompakan dan keselarasan dari keseluruhan Sila-sila tersebut.
3. Sistem Ekonomi Pancasila menolak eksekutif negatif dari dua sistem yang sudah mapan: liberalisme dan komunisme.
4. Sistem Ekonomi Pancasila merupakan keris bermata dua, yaitu cara mencapai tujuan serta tujuan itu sendiri. Dalam memperjuangkan terciptanya masyarakat adil dan makmur kita tidak boleh memakai cara-cara Machiavelistis sehingga mengorbankan prinsip keadilan demi mengejar kemakmuran belaka misalnya.

5. Sistem Ekonomi Pancasila menghormati hak dan kebebasan manusia untuk mencapai prestasi setinggi-tingginya dan memiliki kemampuan ekonomi sebesar-besarnya. Prinsip ini untuk membedakan dari sistem komunisme yang mengingkari hak-hak perorangan. Dalam pada itu hak dan kebebasan berprestasi tersebut diimbangi dengan tanggung jawab moral dan sosial untuk mendayagunakan seluas mungkin kemampuan ekonomi yang dimiliki oleh perorangan.

Melalui penerapan Sistem Ekonomi Pancasila itu diharapkan bangsa dan negara Indonesia dapat menumbuhkan kebanggaan dan kepercayaan pada dunia usaha Indonesia yang selama ini kurang mendapat perhatian dan tempat selayaknya dalam konstelasi kemasyarakatan kita.

Dengan Sistem Ekonomi Pancasila kita harus menarik pelajaran dari pelbagai kelemahan dan keteledoran kita mengimpor dan menjiplak sebagian sistem-sistem ekonomi yang sudah mapan. Kita harus mampu mengendalikan bahtera ekonomi nasional Indonesia di tengah gejolak ekonomi dunia. Dalam alam saling ketergantungan dan saling membutuhkan, kita harus menarik manfaat dari Tata Ekonomi Dunia Baru, untuk peningkatan taraf hidup dan martabat bangsa dan negara Indonesia.

Pokok-pokok pikiran tentang sistem ekonomi Pancasila (SEP)

A. Pelaku-Pelaku dan Pelaksana SEP

Pelaku-pelaku dan pelaksana SEP sesuai dengan yang tersirat dan termaktub dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 adalah seluruh warga negara Republik Indonesia. Dalam rangka pengorganisasian diadakan penggolongan sebagai berikut :

1. Pemerintah mewakili Negara, menguasai cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti air minum, listrik, minyak bumi dan sektor produksi vital lainnya.

2. Masyarakat melalui pelbagai bentuk unit usaha seperti perusahaan perorangan, koperasi dan perseroan sebagai partner pemerintah dan malahan sebagai pemegang peranan utama dalam proses produksi dan distribusi barang dan jasa, di luar cabang-cabang yang mutlak harus dikuasai pemerintah tersebut.
3. Unsur asing baik berupa bantuan kredit, pinjaman luar negeri dari pemerintah negara sahabat maupun investasi modal swasta asing yang beroperasi di bumi Indonesia.

B. Aturan Permainan bagi para Pelaku Pelaksana SEP

1. Perusahaan-perusahaan yang dikuasai Negara sebaiknya memenuhi kriteria tersebut dalam pasal 33 UUD 45 :
(a) bergerak di bidang usaha yang mempunyai nilai strategis: telekomunikasi, minyak bumi; (b) bergerak di bidang pelayanan masyarakat : air minum, listrik, pos, komunikasi ke seluruh wilayah yang tidak dapat dilakukan secara komersial; (c) tetap memperhatikan daya mampu ekonomi nasional kita dalam arti harus efisien, sanggup membiayai keperluan operasional walaupun tidak mutlak harus memperoleh laba, (mengingat faktor non-ekonomis dari bidang usaha yang non-komersial); (d) menahan diri untuk tidak ekspansionis sehingga menimbulkan persaingan tidak sehat dengan unsur masyarakat swasta yang telah memiliki ruang gerak tersendiri; (e) bersama pemerintah, justru perusahaan negara harus juga memberi kesempatan kepada usaha swasta untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak perlu dikerjakan sendiri oleh pemerintah dan perusahaan negara.
2. Unsur dunia usaha swasta selayaknya juga memenuhi kriteria yang termaktub dalam pasal 33 UUD 45 :
 - a. Asas kekeluargaan menuntut sifat menahan diri pada perusahaan besar agar tidak mematikan rekan-rekan pengusaha kecil. Ini bisa dilakukan dengan mengurangi ambisi ekspansionis dan nafsu monopoli dengan memberikan kesempatan kepada perusahaan kecil untuk bertindak sebagai suplier atau sub kontraktor.

- b. Mawas diri pada dunia usaha kecil agar mengoreksi kekeliruan dan kekurangan. Tuntutan dan pemberian fasilitas berlebihan barangkali justru mengurangi disiplin, militansi, efisiensi dan produktivitas. Semua ini harus dimulai dari diri sendiri; tidak ada orang lain atau badan lain dapat menimbulkan sifat-sifat disiplin, militan, efisien dan produktif; itu hanya dapat dimulai dari diri sendiri dengan kemauan sendiri. Ini harus dilakukan agar pemberian kesempatan oleh perusahaan besar (punc 1 di atas) malah merugikan konsumen.
 - c. Petani Indonesia harus ditingkatkan kemampuannya baik melalui usaha koperasi maupun pemberian kesempatan kepada dunia usaha untuk membuka perkebunan padi. Daya beli para petani harus ditingkatkan agar dapat mendorong perkembangan ekonomi. Jangan sampai terjadi petani (melalui pembelian padi oleh pemerintah dengan harga ringan) malahan mensubsidi warga masyarakat yang tinggal di kota. Suatu pola pengembangan pertanian yang lebih terarah harus dilaksanakan.
 - d. Buruh, karyawan dan pegawai harus memperoleh jaminan kesejahteraan yang lebih baik. Dengan demikian mereka pun akan meningkatkan produktivitas mereka agar produksi nasional meningkat sesuai dengan pertambahan kebutuhan serta menghasilkan surplus yang bisa diekspor.
 - e. Pemerintah dalam hal ini harus menyediakan sarana dan menegakkan kewibawaan agar prinsip-prinsip aturan permainan tersebut ditaati dan dilaksanakan sebaik-baiknya. Agar tercipta kemajuan dan keserasian dan keselarasan, aturan permainan ini harus dilengkapi dengan sanksi dan dilaksanakan dengan konsekwen. Semacam Undang-undang Anti Trust dan Small Business Act (di AS) harus diciptakan dan dilaksanakan di Indonesia.
3. Unsur asing, penanam modal luar negeri, jelas harus *lebih* diawasi dan diarahkan agar kegiatan mereka betul-betul merupakan pelengkap dan tidak pengganggu dalam proses pembangunan ekonomi Indonesia:

- a. Pengendalian, pengarahan dan pengawasan lebih ketat terhadap arus dan kegiatan modal asing.
- b. Pelaksanaan yang lebih konkrit dari program pengalihan dan pemindahan teknologi dari luar negeri kepada unsur nasional kita harus lebih cermat dilakukan.
- c. Dua hal itu perlu untuk mengurangi taraf ketergantungan yang timpang dan berlebihan pada unsur asing, dalam peningkatan ketahanan ekonomi nasional kita. Dalam hal ini jelas diperlukan sarana pengaturan, sistem pengawasan dan pelaksanaan peraturan yang efektif. Lebih dari itu, sikap mental pemerintah dan dunia usaha kita juga harus teguh menghadapi godaan materiil unsur asing yang pasti berusaha untuk mempertahankan kepentingan mereka.

C. Strategi Kembar Pemerataan Pendapatan dan Peningkatan Pembangunan

Strategi Kembar Pemerataan Pendapatan dan Peningkatan Pembangunan merupakan jawaban dari bangsa Indonesia terhadap masalah-masalah besar yang dihadapi Indonesia dalam pembangunan bangsa di tengah gejolak dan keresahan yang meliputinya.

- a.1. Pemerataan Pendapatan merupakan satu strategi yang mutlak harus dilaksanakan demi menciptakan kesetiakawanan dan kesatu-paduan dalam tubuh masyarakat dan negara Indonesia.
2. Pemerataan Pendapatan adalah satu strategi yang mutlak harus dilaksanakan apabila kita ingin mengembalikan jiwa dan semangat semasa revolusi kemerdekaan, yaitu kerelaan berkorban, kesetiaan dan perjuangan yang berkobar-kobar. Rakyat kecil harus mendapat kesempatan memperoleh porsinya tanpa ditunda lagi atau harus menunggu berputarnya hukum ekonomi yang percaya kepada akibat ganda (multiplier-effect) daripada kegiatan ekonomi raksasa.

3. Pemerataan Pendapatan adalah satu strategi untuk menciptakan keserasian dan keselarasan nasional yang lebih dinamis daripada sekedar kestabilan politik semu. Selain punt B.2.e. (Anti Trust dan Small Business Act) maka pemilikan saham oleh umum dari perusahaan perseroan (public company) merupakan cara efektif untuk program pemerataan pendapatan ini.
4. Pemerataan pendapatan adalah harga atau pengorbanan yang harus dibayar oleh mereka (sebagian bangsa kita), yang telah lebih dulu menikmati hasil pembangunan, kepada saudara-saudara sebangsa kita yang masih hidup menderita dan melarat agar dapat hidup lebih sesuai dengan martabat manusia. Pada gilirannya mereka yang ditingkatkan taraf hidupnya akan merupakan sumbangan besar bagi kelanjutan proses produksi. Kegairahan, ke rajinan dan ketekunan akan diperoleh dari rakyat kecil apabila mereka juga diberikan kesempatan mulai ikut menikmati hasil pembangunan.
5. Tanpa pemerataan pendapatan maka ketidak-puasan dan rasa ketidak-adilan merupakan sumber bencana dan malapetaka yang sama sekali tidak kita inginkan. Kita tidak menghendaki bahwa komunisme mengebiri dan merampas hak-hak perorangan, tapi kita juga tidak menghendaki bahwa rakyat kecil menderita terus-menerus sementara penumpukan modal dan dan kekayaan berlangsung tanpa batas di kalangan tertentu. Apabila kita ingin memperoleh dukungan mutlak rakyat sebagaimana kita dahulu dikejar Belanda dan dilindungi penduduk kampung, maka sekarang ini kita juga harus membuktikan bahwa pembangunan ini tujuan dan hasilnya adalah demi peningkatan taraf hidup mereka. Beri kesempatan kepada mereka untuk ikut merasakan nikmat dan kebanggaan pembangunan seperti dahulu mereka bangga dan spontan berkorban untuk perjuangan kemerdekaan. Hanya dengan jalan inilah kita dapat memperoleh dukungan mutlak serta keikut-sertaan aktif dalam pembangunan ekonomi nasional kita.

- b. 1. Peningkatan pembangunan merupakan strategi yang mutlak harus dilaksanakan demi menciptakan kemungkinan dan taraf hidup yang lebih maju bagi bangsa Indonesia di tengah kehidupan antar bangsa.
2. Ketertinggalan kita selama beberapa waktu di bidang ekonomi, memang harus ditebus dengan percepatan dan peningkatan pembangunan agar kita tidak terlalu jauh di belakang bangsa-bangsa lain yang lebih muda dari kita dalam usia kemerdekaan.
3. Peningkatan Pembangunan juga mutlak harus dijalankan demi untuk membiayai program pemerataan, karena kebutuhan rakyat dan bangsa Indonesia semakin meningkat secara kuantitatif maupun kualitatif.
4. Peningkatan Pembangunan merupakan imbalan bagi bagian masyarakat yang memiliki kemampuan modal maupun ketrampilan dan telah memperoleh posisi dalam masyarakat untuk lebih meningkatkan daya mampu mereka dan dengan demikian juga meningkatkan ketahanan ekonomi nasional kita.
5. Dalam rangka itu, pemerintah berkewajiban menciptakan sarana-sarana yang diperlukan agar pengusaha kuat mampu meningkatkan peranan mereka, bukan saja di dalam negeri, tapi juga di lingkungan internasional untuk penghasilan devisa maupun kebanggaan bahwa bangsa Indonesia pun mampu bersaing di dunia bisnis raksasa pada skala global. Kesemuanya ini dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi nasional kita agar benar-benar setiap potensi yang dimiliki bangsa kita dapat mengembangkan bakat dan kemampuannya semaksimal mungkin untuk kejayaan bangsa dan negara.

D. Faktor-faktor Non-Ekonomi dalam SEP

Pelaksanaan Strategi Kembar Sistem Ekonomi Pancasila ini tentunya harus didukung penuh dan melibatkan seluruh masyarakat; bukan sekedar masalah pemerintah sendiri, atau

dunia usaha belaka, melainkan seluruh lapisan masyarakat di pelbagai bidang harus turut menunjang :

1. Yang terpenting ialah apresiasi masyarakat terhadap falsafah, hakikat dan peranan dunia usaha, serta bidang ekonomi, agar kembali pada proporsi yang wajar dan tepat. Harus diubah pandangan meremehkan pengusaha, ataupun mendewakan perekonomian.
2. Pemerintah dan dunia usaha pun harus menanggapi apresiasi masyarakat tersebut dengan sebaik-baiknya. Faktor-faktor non ekonomi dalam proses pembangunan harus diperhatikan. Misalnya dengan memperhatikan keadaan lingkungan yang masih sederhana, pengusaha harus membatasi diri dari pengaruh modernisasi berupa pola konsumsi mewah. Para pejabat pemerintah pun harus menginsafi keadaan lingkungan ini dan tidak mengundang antipati dengan sikap materialistis berlebihan.
3. Setelah keduanya saling menginsafi, saling menghormati dan menyegani, serta menyadari keperluan untuk saling bekerjasama, maka harus diciptakan sarana-sarana kerjasama yang saling menguntungkan antara dunia usaha dan sektor non ekonomi, agar keduanya memperoleh manfaat maksimal.
4. Kerjasama itu dapat dilakukan oleh hampir semua unsur di semua sektor non ekonomi dengan sektor usaha.
 - Kerjasama pendidikan dan latihan untuk memperoleh tenaga-tenaga terlatih dengan dunia pendidikan
 - Kerjasama penelitian ilmiah dan riset untuk meningkatkan daya mampu bangsa Indonesia di bidang teknologi
 - Kerjasama di bidang kebudayaan antara dunia usaha dengan para seniman dan budayawan demi untuk memelihara kekayaan budaya kita, menggali kebudayaan lama serta menciptakan budaya masa depan

- Kerjasama dengan setiap unsur di sektor lain atas dasar prinsip saling ketergantungan, saling membutuhkan dan saling menguntungkan, seperti di bidang olahraga, kesejahteraan sosial dan lain-lain.

5. Faktor non ekonomi yang terpenting dan bahkan lebih penting daripada faktor ekonomi, adalah sikap mental bangsa kita untuk lebih berorientasi kepada masa depan, kemajuan dan peningkatan kesejahteraan. Sikap mental yang berorientasi kepada pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Dalam hal ini jelaslah bahwa ciri-ciri negatif yang selama ini selalu dihembuskan oleh pelbagai kalangan baik secara tradisional maupun dengan gaya ilmiah cendekiawan harus kita hapuskan bersama-sama. Ciri-ciri tersebut adalah:

- Bangsa Indonesia ialah bangsa lamban, penganut falsafah alon-alon asal kelakon, berarti kurang militan, kurang disiplin, kurang efisien dan kurang produktif.
- Bangsa dan negara Indonesia termasuk bangsa lembek (soft state & nation). Benarkah falsafah Jawa tentang keserasian dan keselarasan harus diartikan bahwa kita toleran terhadap penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan, terhadap korupsi, terhadap komersialisasi jabatan dan macam-macam kelemahan dan kekurangan?
- Bangsa Indonesia termasuk dalam lingkungan non Sinic Culture, yang dalam proses perlombaan pembangunan dengan bangsa-bangsa di Asia Timur lainnya (termasuk Indocina/Vietnam) pasti ketinggalan karena sifat-sifat lemah tersebut di atas.

Jawaban dan bantahan terhadap ciri-ciri negatif yang dikaitkan dengan tubuh bangsa Indonesia ini harus dijawab oleh seluruh bangsa, dan tidak mungkin dibantah hanya oleh dunia usaha kita. Ini adalah tantangan nasional.

E. Sistem Ekonomi Pancasila dan Tata Ekonomi Dunia Baru

1. Dalam alam saling ketergantungan dan saling membutuhkan antara pelbagai bangsa dan negara di seluruh dunia, maka harus diciptakan pola kerja-sama yang saling menguntungkan antara semua bangsa dan negara di dunia.
2. Perjuangan menegakkan Tata Ekonomi Dunia Baru se योगyanya didasari pula dengan tekad dari negara-negara yang sedang berkembang untuk melakukan pembangunan berlandaskan strategi kembar : pemerataan pendapatan dan peningkatan pembangunan. Hanya bila masing-masing negara berkembang mempunyai kemampuan untuk mewujudkan Tata Ekonomi Nasional Baru di dalam negeri masing-masing, maka mereka mempunyai kelebihan posisi dalam tawar menawar dengan negara-negara yang sudah maju.
3. Perjuangan menegakkan Tata Ekonomi Dunia Baru membutuhkan adanya kemauan politik dan kesediaan negara-negara maju untuk mengurangi sebagian potensi mereka dan membagikannya kepada negara-negara sedang berkembang. Kesediaan politik itu meliputi tiga masalah besar yaitu :
 - a. penyesuaian harga komoditi barang mentah, sumber alam dan mineral ;
 - b. perluasan ekspor dari negara berkembang ke negara maju ;
 - c. pengalihan teknologi dari negara maju kepada negara berkembang
4. sistem Ekonomi Pancasila yang pada tingkat nasional dengan strategi kembarnya berhasil melaksanakan pembangunan yang berkeadilan sosial, berkepentingan dengan suksesnya Tata Ekonomi Dunia Baru. Hal ini mengingatkan bahwa ekonomi Indonesia adalah bagian tak terpisahkan dari ekonomi dunia.
5. Sistem Ekonomi Pancasila tidak menghendaki konfrontasi yang pada akhirnya akan merugikan semua pihak dalam apa

yang disebut pertentangan atau jurang antara negara kaya (utara) dan negara miskin (selatan). Apabila negara-negara Selatan mampu meningkatkan ketahanan ekonomi nasional masing-masing secara konkrit dan menciptakan pula ketahanan regional yang lebih tangguh, niscaya perjuangan menuntut pelbagai konsesi dari negara kaya (utara) akan diperhitungkan dan ditanggapi dengan baik, mengingat kepada asas ketergantungan dan saling membutuhkan, yang memberi tempat kepada hubungan saling menguntungkan.

DAFTAR PUBLIKASI CSIS

I. SERI BUKU

1. Some Basic Thoughts on the Accelèration and Modernization of 25 Years Development, Ali MOERTOPO a Rp. 1.250,—
2. Dasar-dasar Pemikiran tentang Akselerasi Modernisasi Pembangunan 25 Tahun, Ali MOERTOPO
3. Dua Pemikiran tentang Pertahanan Keanaman dan Strategi Nasional, Daoed JOESOEF a Rp. 1.000,—
4. The World of Strategy and the Foreign Policy of Nation
5. Economic Development and National Resilience, R.B. SOEHARTONO a Rp. 500,—
6. Persoalan Masa Kini : Perusahaan-perusahaan Multinasional, J. PANGLAYKIM a Rp. 1.500,—
7. Strategi Politik Nasional, Ali MOERTOPO a Rp. 1.000,—
8. Business Relations between Indonesia and Japan, J. PANGLAYKIM a Rp. 500,—
9. Indonesia dan Dunia Internasional 1974 a Rp. 1.750,—
10. Trends in Marketing, J. PANGLAYKIM a Rp. 1.000,—
11. Regionalism in Southeast Asia a Rp. 1.250,—
12. Buruh dan Tani dalam Pembangunan, Ali MOERTOPO a Rp. 400,—
13. Seminar Strategi Pembinaan Pengusaha Swasta Nasional a Rp. 2.000,—
14. Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila (edisi luks) a Rp. 1.200,—
15. Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila (edisi biasa) a Rp. 300,—
16. Self Reliance and National Resilience a Rp. 1.250,—
17. Second Indonesian — Japanese Conference a Rp. 1.500,—
18. Indonesia dan Dunia Internasional 1975 a Rp. 4.000,—
19. Indonesia dan Dunia Internasional 1976 a Rp. 5.000,—
20. Sistem Pendidikan dan Pengembangan Kewiraswastaan di Indonesia a Rp. 2.000,—
21. Japan — Indonesia Relations in the Context of Regionalism in Asia a Rp. 1.500,—
22. Indonesia's Economic and Business Relations with ASEAN and Japan, J. PANGLAYKIM a Rp. 3.000,—
23. Timur Tengah dalam Pergolakan, Kirdi DIPOYUDO a Rp. 1.500,—
24. Afrika dalam Pergolakan, Kirdi DIPOYUDO a Rp. 1.500,—
25. Southeast Asia and the World of Tomorrow a Rp. 3.000,—
26. Strategi Kebudayaan, Ali MOERTOPO a Rp. 750,—
27. Indonesia dan Dunia Internasional 1977 a Rp. 5.000,—

ANALISA

II. TERBITAN BERKALA

- | | | |
|--|------------|-----------------------|
| 1. RINGKASAN PERISTIWA
(terbit setiap 2 minggu) | @ Rp 350,— | Rp 10.000,— per tahun |
| 2. ANALISA
(terbit setiap bulan) | @ Rp 700,— | Rp 8.000,— per tahun |
| 3. MONOGRAF | @ Rp 700,— | |
| 4. THE INDONESIAN QUARTERLY
(terbit setiap 3 bulan) | @ Rp 800,— | Rp 3.200,— per tahun |

Pesanan dengan pembayaran di muka. Untuk Seri Buku, pesanan luar kota ditambah ongkos kirim \pm 15%; dialamatkan pada : CSIS, Biro Publikasi, Jalan Tanah Abang III/27, Jakarta Pusat.

DAFTAR ISI ANALISA

TAHUN V, 1976

1. EKONOMI DUNIA DAN SISTEM KINGSTON

- N. ARSJAD, *Ciri-ciri Ekonomi Dunia Dasawarsa Tahun-tahun Tujuhpuluhan*
- N. ARSJAD, *Kingston System : Sistem Moneter Internasional Baru*

2. ASEAN : PROSPEK DAN PERMASALAHANNYA (I)

- J. PANGLAYKIM, *Kerjasama Ekonomi — Perdagangan ASEAN Beberapa Tanggapan atas Konsep ASEAN Free Trade Area*
- J. Soedjati DJIWANDONO, *ASEAN Sesudah KTT*

3. ASEAN : PROSPEK DAN PERMASALAHANNYA (II)

- J. PANGLAYKIM, *Wilayah Perdagangan Selektif ASEAN : Suatu Kemungkinan Bentuk Kerjasama Ekonomi ASEAN*
- J. PANGLAYKIM, *Suatu Pemikiran Bagaimana Dapat Menilai Iklim Investasi di Negara-negara ASEAN dan Asia Umumnya*
- Daoed JOESOEF, *Renungan Mengenai Masalah Free Trade*

4. EKONOMI DAN MASYARAKAT MANUSIAWI

- Pintor SIMANDJUNTAK, *Strategi Kebutuhan Pokok*
- Tjipto SOEMARTONO, *Peranan Profesi Kedokteran dalam Menunjang Proses Akselerasi Modernisasi*
- Daoed JOESOEF, *Masalah Pola Industri, Sekuriti dan Independensi Ekonomi Nasional*

5. BUDAYA DAN PENDIDIKAN

- A.M.W. PRANARKA, *Merintis Jalan menuju Tata Dunia Yang Lebih Manusiawi*
- A.M.W. PRANARKA, *Elite En Massa — Suatu Catatan tentang Tulisan Prof. W.F. WERTHEIM*
- S. HARTO, *Kapasitas dan Produktivitas Perguruan Tinggi Kita Masih Rendah*
- S. HARTO, *Beberapa Catatan Sekitar Masalah : Kuliah Kerja Nyata*

6. UTARA—SELATAN & TIMUR—BARAT

- N. ARSJAD, *Peranan UNCTAD dan OPEC : Kerjasama atau Konfrontasi?*
- O. Abdul RACHMAN, *Perspektif Sekuriti di Samudra Indonesia*

7. PENGAWASAN PEMBANGUNAN DAN ANGGARAN BELANJA NEGARA

- Soedjono HOEMARDANI, *Peranan Pengawasan dalam Pembangunan*
- Rufinus LAHUR, *Catatan Mengenai "Waktu Pengajuan" Rancangan Undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU—AP-BN)*

8. NON—ALIGNMENT

- A.R. SUTOPO, *Non-Alignment dan Partisipasi Indonesia*
- Kirdi DIPOYUDO, *Suatu Tinjauan atas Gerakan Non-Blok*

9. NEGARA NON—BLOK DAN MASALAH HABITAT

- N. ARSJAD, *Negara-negara Non-Blok dan Masalah Ekonomi Dunia*
- Onny S. PRIYONO, *Habitat dalam Perspektif Hubungan Manusia*

10. SURIAH DI LIBANON DAN PENYELESAIAN RASIAL.

- Kirdi DIPOYUDO, *Intervensi Suriah dalam Perang Saudara di Libanon*
- Kirdi DIPOYUDO, *Menuju Perdamaian Rasial di Afrika bagian Selatan*

11. MASALAH DANA INTERNASIONAL & NASIONAL

- N. ARSJAD, *Sidang Tahunan IMF — Bank Dunia 1976*
- J. PANGLAYKIM, *Kelambatan Perkembangan lembaga-lembaga Keuangan Nasional akan Memperbesar Ketergantungan pada Bank-bank Internasional*

12. BEBERAPA TINJAUAN TAHUN 1976

- Rufinus LAHUR, *Tinjauan Mengenai Beberapa Segi Daya Fungsional Aparatur Pelaksana Menjelang Tahun 1977*
- Kirdi DIPOYUDO, *Kompetisi Superpower di Benua Afrika*
- A.M.W. PRANARKA, *Situasi Sosial — Budaya Indonesia 1976*

TAHUN VI, 1977

1. BEBERAPA PROSPEK PERKEMBANGAN TAHUN 1977

- Kirdi DIPOYUDO, *Perkembangan di Afrika Bagian Selatan*
- A.R. SUTOPO, *Masalah Komunisme di Negara-negara ASEAN*
- Kirdi DIPOYUDO, *Perkembangan Politik Dunia Arab*
- N. ARSJAD, *Perkembangan Dana Pinjaman Internasional dan Pengaruhnya pada Perekonomian Indonesia*

2. ASIA TENGGARA : PERKEMBANGAN DAN PROSPEKNYA

- Ali MOERTOPO, *Perkembangan di Asia Tenggara dalam Bidang Politik, Ekonomi dan Strategi dengan Titik Berat Khusus pada Hari Depan ASEAN*
- Kirdi DIPOYUDO, *Asia Tenggara dan Prospeknya : Suatu Tinjauan Umum*
- Parlaungan SIBARANI, *Sekitar kepulauan Paracel dan Spratly*
- Bing P. LUKMAN, *Renungan Satu Tahun KTT ASEAN Bali*

3 + 4 BEBERAPA SEGI PEMBANGUNAN

- Rufinus LAHUR, *Organisasi Politik "Hasil Pembaharuan dan Penyederhanaan Kehidupan Politik"*
- F.X. SOEDIJANA, *Hukum Ekonomi*
- Ramzy TAJUDIN, *Strategi Akseptabilitas Sosial Organisasi*
- H. Anton DJAWAMAKU, *Agropolis : Pembangunan Desa dan Pengembangan Wilayah di Daerah Pedesaan*
- A. Rahman RANGKUTI, *Pengembangan Padi Gogo dalam Peningkatan Produksi Beras*
- Kirdi DIPOYUDO, *Demokrasi Pancasila*

5. KEPINCANGAN HUBUNGAN UTARA—SELATAN

- J. PANGLAYKIM, *Dengan Persetujuan Pemasaran Yang Serba Diatur, Negara-negara Industri Mau Menang Sendiri*
- J. PANGLAYKIM, *Perspektif Pertemuan Puncak London*
- N. ARSJAD, *Kerjasama Ekonomi Internasional Masa Kini dan Masalahnya: Dialog Utara — Selatan*
- J. PANGLAYKIM, *Keuntungan Lebih Besar Yang Dicapai Bank-bank Amerika Karena Bisnisnya Dengan Dunia Ketiga*

6 + 7. BEBERAPA PERKEMBANGAN INTERNASIONAL

- A.R. SUTOPO, *Amerika Serikat dan Uni Soviet dalam SALT : Mencari Perimbangan Persenjataan Strategis*
- Kirdi DIPOYUDO, *Perimbangan Kekuatan Baru di Asia Tenggara*
- O. ABDULRACHMAN, *Kawasan Timur Tengah Tak Kunjung Damai*
- Bing P. LUKMAN, *Gerakan Euro-Komunisme dan Supremasi Komunis Uni Soviet*
- Kirdi DIPOYUDO, *Pergolakan di Kawasan Laut Merah*

8. PERKEMBANGAN ASEAN

- Bing P. LUKMAN, *Menjelang Dasawarsa ASEAN : Suatu Tinjauan Kulturil*
- N. ARSJAD, *Membangun Masyarakat Ekonomi ASEAN : Mungkinkah Dicapai?*
- Bing P. LUKMAN, *Indocina Sparing Partner ASEAN*
- Christianto WIBISONO, *Perspektif Kompetisi Indonesia — Vietnam*
- A.R. SUTOPO, *Masalah Minoritas Muslim di Pilipina Selatan : Prospek Penyelesaian Yang Menyeluruh*

9. GENERASI MUDA

- Pande Radja SILALAH, *Generasi Muda dalam Strategi Pembangunan di Masa Depan*
- S. HARTO, *Partisipasi Mahasiswa dalam Pembangunan Pedesaan*
- S. HARTO, *Perguruan Tinggi Swasta dalam Sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia : Suatu Tinjauan, tentang Masalah Pembinaan dan Pengembangannya*

10. JEPANG DAN POLITIK EKONOMI LUAR NEGERINYA

- J. PANGLAYKIM, *Perubahan-perubahan Politik dan Konsep Kerjasama, Keamanan dan Perbatasan Ekonomi Jepang*
- Pande Radja SILALAH, *Pandangan Jepang terhadap ASEAN Berubah?*
- J. PANGLAYKIM, *Doktrin Fukuda : Suatu Pandangan Bisnis*

11. BEBERAPA MASALAH DALAM NEGERI

- Rahman RANGKUTI, *Masalah Peningkatan Produksi Beras*
- F.X. SOEDIJANA, *Kebijaksanaan Perburuhan dalam Penanaman Modal Asing*
- N. ARSJAD, *Pasar Uang dan Pasar Modal di Indonesia : Perkembangan, Masalah dan Hambatannya*
- S. HARTO, *Masalah "Kultur Oposisi" dalam Demokrasi Pancasila*

12. BEBERAPA ULASAN TAHUN 1977

- Kirdi DIPOYUDO, *Timur Tengah Fokus Perhatian Dunia Tahun 1977*
- S. HARTO, *Masalah Kebebasan Ilmiah dan Kebebasan Mimbar pada Perguruan Tinggi*
- Rufinus LAHUR, *Tinjauan Dalam Negeri Tahun 1977*

TAHUN VII, 1978

1. PERSPEKTIF 1978

- J. PANGLAYKIM, *Indonesia dan Fokus Bisnis Internasional dalam Tahun 1978*
- Kirdi DIPOYUDO, *Perlombaan Timur-Barat di Kawasan Samudera Hindia*
- N. ARSJAD, *Masalah Krisis Dollar Amerika Serikat dan Pengaruhnya atas Nilai Rupiah*

ANALISA

2. VIETNAM—KAMBOJA, SELAT MALAKA & MASALAH RASIAL

- A.R. SUTOPO, *Beberapa Segi Konflik Vietnam-Kamboja : Menuju Hegemoni Kawasan?*
- Asnani USMAN, *Kedudukan Selat Malaka Sebagai Perairan Teritorial dan Jalur Pelayaran Internasional ditinjau dari Segi Politik Internasional*
- Kirdi DIPOYUDO, *Masalah Rasial di Afrika Selatan*

3. PANCASILA ARTI DAN PENERAPANNYA

- Kirdi DIPOYUDO, *Negara dan Ideologi Negara-Suatu Pengantar*
- Kirdi DIPOYUDO, *Pancasila Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*
- Kirdi DIPOYUDO, *Pancasila Moral Bangsa Indonesia-Suatu Pengantar*
- Christianto WIBISONO, *Menuju Sistem Ekonomi Pancasila*

MONOGRAF

1. J. PANGLAYKIM, *BEBERAPA PEMIKIRAN TENTANG MEMPERTINGGI KAPABILITAS DAN KAPASITAS BANK—BANK SWASTA NASIONAL* Rp. 700,—
2. A.M.W. PRANARKA, *SITUASI KULTURIL DUNIA DEWASA INI* Rp. 700,—
3. KWIK Kian Gie, *KREDIT MACET, DILEMMA MASA KINI* Rp. 700,—
4. Jusuf WANANDI, *KEBIJAKAN LUAR NEGERI PRESIDEN CARTER DAN PERANAN KONGRES AS* Rp. 700,—

DAFTAR ISI THE INDONESIAN QUARTERLY

Vol. I No. 1, OCTOBER 1972

- Ali MOERTOPO, *Some Basic Considerations in 25-Years Development*
- Adam MALIK, *Indonesia's Foreign Policy*
- SOEDIJANA, *People's Consultative Assembly*
- Barlianta HARAHAHAP, *Changes in the State Budget and Its Relationship to the Development Process in Indonesia*
- Gunawan MUHAMMAD, *In Search of a New Ethos*
- Chronicles

Vol. I No. 2, JANUARY 1973

- Juwono SUDARSONO, *ASEAN : The Uncertain Commitment*
- LIE Tek Tjeng, *ASEAN and East Asia in the Seventies : Some Remarks*
- Sumitro DJOJOHADIKUSUMO, *Foreign Economic Relations — Some Trade Aspects*

DAFTAR PUBLIKASI CSIS

- J. PANGLAYKIM (PANGESTU), *Domestication of Multinational Corporations and Southeast Asia*
- Sayidiman SURYOHADIPROJO, *The Future of Southeast Asia*
- Soerjono SOEKANTO, *Elites in Three Southeast Asia Countries*
- J. Soedjati DJIWANDONO, *Neutralization : A New Hope of Southeast Asia*
- Documents : The ASEAN Declaration; Organizational Chart of ASEAN; The Kuala Lumpur Declaration
- Chronicles

Vol. I No. 3, APRIL 1973

- Rosihan ANWAR, *Socio-Political Aspects of the MPR*
- Rufinus LAHUR, *The Broad Lines of the State Policy*
- SUKIJAT, *General Government and Regional Autonomy*
- Soeleiman SOEMARDI, *Pattern of Social Development According to the Broad Lines of the State Policy*
- A. HAFID, *Population Policy and Social-Economic Development in the Broad Lines of the State Policy*
- MASHURI, *Problems Underlying Educational Reform*
- Jakob UTOMO, *The Indonesian Press and Development*
- Barlianta HARAHA, *Election of the President and Vice-President : Office, Responsibility and Power*
- Documents : The Broad Lines of the State Policy; Bio-Sketch of President Soeharto; Bio-Sketch of Vice-President Sri Sultan Hamengku Buwono IX
- Chronicles

Vol. I No. 4, JULY 1973

- SOEDJATMOKO, *Reflections on Non-Alignment in the 1970's*
- O. Sutomo ROESNADI, *ASEAN and the Great Powers.*
- M. Hadi SOESASTRO, *Japan and Southeast Asia : A Regional or a Global Question?*
- J. PANGLAYKIM, *Some Notes on Japan — Indonesia Business Relations : An Indonesian View*
- Sri-Edi SWASONO, *Some Notes on the Nurturing of the Indonesian Entrepreneur*
- Sayidiman SURYOHADIPROJO, *The Territorial Defense Concept*
- Ali MOERTOPO, *The Security Aspect of Energy Resources*
- Tb. Bachtiar RIFAI, *Education and the Development of the Younger Generation*
- Documents : Mineral Resources Development in Indonesia ; Japanese Investment in Indonesia
- Chronicles

Vol. II No. 1, OCTOBER 1973

- BOECHARI, *Some Aspects of Traditional Society*
- Moh. Said REKSOHADIPRODJO, *The Inner Life of the Javanese*
- T.O. IHROMI, *The Relevance of Studying Ethic Groupings in Indonesia*
- Bonokamsi DIPOJONO, *Kebatinan and Kebatinan Movements for the Javanese*
- Soerjono SOEKANTO, *Elites in Adat Villages of Lampung and Minangkabau*
- Ajip ROSIDI, *Experiences in Recording Pantun Sunda*
- Pandam GURITNO, *Wayang Purwa*

ANALISA

- Anton M. MOELIONO, *Terms and Terminological Language*
- Chronieles

Vol. II No. 2, JANUARY 1974

- Soedjono HOEMARDANI, *Indonesia — Japan Relations in the Future — A Strategic Review*
- Moh. SADLI, *Impressions on the First Japanese-Indonesian Conference*
- Soemitro DJOJOHADIKUSUMO, *The Economic Future of the Pacific Basin*
- Daoed JOESOEFF, *Knowledge Economy and World Economy*
- THEE Kian-wie, *Foreign Investment and Labour-Intensive Industries*
- M. Hadi SOESASTRO, *A Well-Balanced Growth Coupled with Justice : An Economic or a Political Issue?*
- NUGROHO, *Data Flow and Statistical Organization in Indonesia*
- J. PANGLAYKIM, *Business Administration : Curricular Implications*
- A.M.W. PRANARKA, *Critical Analysis of the Process of Educational Reform in Indonesia*
- Paramita R. ABDURACHMAN, *In Search of Spices : Portuguese Settlements on Indonesia Shores*
- Chronieles

Vol. II No. 3, APRIL 1974

- Juwono SUDARSONO, *International Studies in Indonesia : Problems in Training and Research*
- Harsja W. BACHTIAR, *The Social Sciences in Indonesia*
- Iskandar ALISJAHBANA, *Technology and Development*
- Selo SOEMARDJAN, *Tourism Site Development Planning Problems and Possibilities*
- Wiratmo SUKITO, *National Resilience and the Role of Culture*
- Dilip CHANDRA, *Indo-Indonesia Relations : An Indian Viewpoint*
- Chronieles

Vol. II NO. 4, JULY 1974

- Sumitro DJOJOHADIKUSUMO, *Energy and Raw Materials Present and Future*
- Ali MOERTOPO, *Politics and Raw Materials : Challenges of the World Today and the Consequences for Domestic Policies*
- Mohammad SADLI, *Oil and Development*
- H.S. KARTADJOEMENA, *Independence and International Realities : Indonesia as Natural Resource Producer and an Intermediate Power*
- St. Munadjat DANUSAPUTRO, *Wawasan Nusantara and the International Sea System*
- Documents : Address by the President of the Republic of Indonesia, H.E. General Soeharto; Opening Statement by the Leader of the Indonesian Delegation at the Seventh ASEAN Ministerial Meeting, Jakarta 7 May 1974; Joint Communiqué
- Chronieles

Vol. III No. 1, OCTOBER 1974

- Ali MOERTOPO, *The International and Strategic Aspects of the Energy Problem*
- Donald G. McCLOUD, *Quantitative Analysis in Indonesian Foreign Policy*

DAFTAR PUBLIKASI CSIS

- Soedjana SAPIIE, *Transfer of Technology A Proposed Solution for Indonesia*
- J. PANGLAYKIM, *Financial Institutions in Indonesia : Some Notes*
- Anwar NASUTION, *Macro-Economic Development 1966-1973*
- Harimurti KRIDALAKSANA, *The Function of a Standard Dictionary in the Development of Indonesian*
- Chronicles

Vol. III No. 2, JANUARY 1975

- Djisman S. SIMANDJUNTAK, *A Look at the Economy in 1974*
- Daed JOESOE, *International Economy Including Problem of Natural Resources*
- Mochtar KUSUMAATMADJA, *Indonesia and the Law of the Sea Issue*
- Nugroho NOTOSUSANTO, *The Historical Development of the Dual Function of the Indonesian Armed Forces*
- Mastini HARDJO—PRAKOSO, *The Development of Libraries in Indonesia*
- Chronicles

Vol. III No. 3, APRIL 1975

- N. ISKANDAR, *When Z.P.G. in Indonesia?*
- S.B. JOEDONO, *Japanese-Indonesian Relations : Present Problems and Future Possibilities*
- KWIK Kian Gie, *Foreign Capital and Economic Domination*
- Z. SALIM, *The Case for Industrially-Based Transmigration : Some Suggestions*
- Haryati SOEBADIO, *The Documentary Study of Traditional Balinese Architecture Some Preliminary Notes*
- Chronicles

Vol. III No. 4, JULY 1975

- St. Munadjat DANUSAPUTRO, *The International Sea System in Perspective*
- J. PANGLAYKIM, *Financial Markets and Their Contribution to the Development of ASEAN : An Assessment*
- Bing P. LUKMAN, *After the War : Indochina and the Politics of Southeast Asia*
- J. Stephen HOADLEY, *New Zealand and Indonesia : The Evolving Relationship in Regional Perspective*
- Hermien Hadiati KOESWADJI, *The Historical Development of Villages on the Island of Lombok*
- Chronicles

Vol. IV No. 1 OCTOBER 1975

- H. Roeslan ABDULGANI, *The Origins of the Concept "Free and Active" in Indonesian Foreign Policy*
- Taufik ABDULLAH, *National Integration and Social Science in Indonesia*
- LIE Tek Tjeng, *The Asahan Project and the Future of Indonesian-Japanese Relations : Some Remarks*
- H. SIREGAR, *Prognostications for Indonesian Selfsufficiency in Rice*
- Wiratmo SUKITO, *The Inviolability of Cultural Frontiers*
- Chronicles

Vol IV No. 2, 3, 4 SPECIAL ISSUE 1976

- J. Soedjati DJIWANDONO, *The ASEAN after the Bali Summit*
- Ali MOERTOPO, *Political, Economic and Strategic Development of Southeast Asia with Particular Emphasis on the Future of ASEAN*
- Sumitro DJOJOHADIKUSUMO, *A Note on ASEAN : Present and Future*
- J. PANGLAYIKIM, *Indonesia's Economic and Business Relation with other ASEAN Countries*
- Daoed JOESOEF, *Some Thoughts on Free Trade*
- Michael LEIFER, *Problems and Prospects of Regional Cooperation in Asia : The Political Dimension*
- Documents : The ASEAN Declaration; The Kuala Lumpur Declaration; Declaration of ASEAN Concord; Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia; Agreement on the Establishment of the ASEAN Secretariat; Joint Press Communique of the Meeting of the ASEAN Heads of Government, Bali, 23-24 February 1976
- Chronicles

Vol. V No. I, JANUARY 1977

- Daoed JOESOEF, *The New International Economic Order*
- Sumitro DJOJOHADIKUSUMO, *Technology, Economic Growth and Environment*
- J. PANGLAYKIM, *Commodity Price Stability*
- A.R. SOEHOED, *Commodities and Viable Economic Sectors A Possible Basis for Development Planning*
- O. Abdul RACHMAN, *Minerals, Food and Shipping : Factors in Strategic Considerations*
- Soedjono HOEMARDANI, *Supervision of Development*
- Chronicles

Vol. V No. 2, APRIL 1977

- J. Stephen HOADLEY, *New Zealand and ASEAN*
- Ali MOERTOPO, *The Indian Ocean : Strategic and Security Problems*
- J. PANGLAYKIM, *North-South Production Trade Patterns*
- W. Donald McTAGGART, *Aspects of the Tourist Industry in Indonesia*
- Ziad SALIM, *The Growth of the Indonesian Language : The Trend towards Indo-Saxonization.*
- Sartono KARTODIRDJO, *Peasant Mobilization and Political Development in Indonesia*
- Chronicles

Vol. V No. 3, JULY 1977

- Harry TJAN SILALAH, *The 1977 General Elections : The Result and the Role of Traditional Authority Relations in Modern Indonesian Society*
- WIJARSO, *The Energy Game : An Indonesian Version*
- Ziad SALIM, *Overdevelopment as a Development Problem*
- Hermien Hadiati KOESWADJI, *Some Legal and Medical Problems in the Implementation of the National Family Planning Program in Indonesia*
- Peter and Sheryl SILZER, *Discourse Considerations in Bahasa Indoensia*
- Chronicles

Vol. V No. 4, OCTOBER 1977

- S. HARTO, *Private Universities in the System of Higher Education in Indonesia*
- M. Soenardi DJIWANDONO, *Introducing KKN : Indonesia's National Study Service Scheme*
- MASHURI, *Pancasila Democracy*
- Sumitro DJOJOHADIKUSUMO, *Energy Perspectives of the Third World*
- John M. MURPHY, *The International Dimensions and Domestic Considerations of Deep Seabed Mining*
- Franklin B. WEINSTEIN, *The United States, Japan and Asian Security*
- Chronicles

Vol. VI No. 1, JANUARY 1978

- Sumitro DJOJOHADIKUSUMO, *What do the "Take-Off" Countries Expect from Industrial and Oil Producing Countries?*
- J. PANGLAYKIM, *The Fukuda Doctrine : A Businessman's View*
- Ali Noor LUDDIN, *Investment Opportunities in Agro Industry in Indonesia*
- Sabana KARTASASMITA, *Aspects of Marketing and International Cooperation in Tin Commodities with Reference to Indonesia*
- A.S. NATABAYA, *The Archipelagic Principles and Indonesia's Interests*
- Aprilani SOEGIARTO, *The Development of Marine Science Capabilities in Indonesia*
- Book Review : Donald W. Fryer & James C. Jackson, *Indonesia*
- Chronicles

Vol. VI NO. 2, APRIL 1978

- Mari Elka PANGESTU, *The Unemployment Drama in the Less Developed Countries : Indonesia*
- Ali MOERTOPO, *Political and Economic Development in Indonesia in the context of Regionalism in Southeast Asia*
- Jusuf WANANDI, *President Carter's Foreign Policy and the Role of the American Congress*
- Hendra ESMARA, *The Long-Range Economic Perspective of West Sumatra*
- Haryati SOEBADIO, *Kartini, A Modern Woman, and Yet a Child of Her Time*
- Book Review : Douglas Miles M.A. PhD., *Cutlass & Crescent Moon, A Case of Social and Political Change in Outer Indonesia*
- Chronicles

Berlangganan ANALISA - Anda berarti memetik keuntungan.

Apabila Anda berminat mendapatkan ANALISA harga tiap eks Rp. 700,- masih ditambah ongkos kirim sekitar 15 %. Tapi bila Anda memilih untuk menjadi Pelanggan ANALISA, maka untuk langganan setahun (12 nomor penerbitan) Anda cukup hanya membayar Rp. 8.000,- sudah termasuk ongkos kirim. Istimewa bagi Mahasiswa akan memperoleh potongan khusus 10 % untuk langganan setahun (sertakan foto copy Kartu Mahasiswa Anda). Catatkan dari sekarang nama Anda sebagai Pelanggan ANALISA sekaligus mengirim uang langganannya.

FORMULIR LANGGANAN

Harap dicatat sebagai Pelanggan ANALISA

Nama : _____

Alamat : _____

Universitas * : _____

Untuk langganan selama setahun (12 nomor) mulai nomor : _____

Bersama ini kami kirim uang langganan Rp. 8.000,-/Rp. 7.200,-
melalui pos wesel atau _____

Mengetahui **

Pelanggan,

* khusus untuk Mahasiswa

** cap dan tanda tangan pihak Fakultas

Kirimkan Formulir ini kepada :

Centre for Strategic and International Studies

up. Biro Publikasi, Jl. Tanah Abang III/27 Jakarta Pusat, Telp. 356532-5

MAJALAH ANALISA, RINGKASAN PERISTIWA, THE INDONESIAN QUARTERLY dan BUKU-BUKU CSIS dengan mudah bisa Anda dapatkan di

MEDAN : TB Deli; PEKANBARU: TB Penyalur Berita; PADANG: TB Pancaran Ilmu, TB Pustaka Angrek; PALEMBANG: TB Sriwijaya; JAKARTA: TB Ichtiar, TB Gramedia, TB Tropen, TB Gunung Agung. TB BPK Gunung Mulia, TB Tamaddun, TB Tintamas; TB Djembatan; TB Kinta; TB Marco; TB Pradjanparamita, Bursa Buku Fak. Ekonomi UI; TB Jayakarta, TB Pelita; BANDUNG: TB Sumur Bandung, TB Karya Nusantara, TB Djawa; SEMARANG: TB Merbabu, TB Surya, TB Gajah Mada; JOGYAKARTA: TB Hien Hoo Sing, TB Kedaulatan Rakyat, TB Pembangunan; MAGELANG: TB Kedaulatan Rakyat; SURAKARTA: TB Budhilaksana; MALANG: TB Atoom; SURABAYA: TB Sari Agung; UJUNG PANDANG: TB Bhakti Baru, Hasanuddin University Press; IRIAN JAYA: TB Gunung Agung; DENPASAR: TB Sumber Agung



Untuk menunjang kegiatan studi mahasiswa, para peneliti maupun lembaga-lembaga universitas, instansi-instansi pemerintahan dan umum, CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS) menyediakan penerbitan berupa majalah dan buku-buku yang membahas masalah-masalah sosial, budaya, politik, hukum, ekonomi, pendidikan, strategi, pemerintahan, ideologi dan hubungan internasional yang sangat luas.



ANALISA

terbitan berkala, menyajikan beberapa analisa peristiwa dan masalah internasional dan nasional, baik ideologi dan politik maupun ekonomi, sosial budaya dan pertahanan serta keamanan, yang ditulis oleh staf CSIS maupun dari luar CSIS. Termasuk dalam seri ini adalah MONOGRAF yang membahas satu analisa tertentu



RINGKASAN PERISTIWA

majalah dwipekan, berisikan ringkasan peristiwa di dalam negeri [politik, ekonomi, sosial, budaya, pembangunan dan hankam] dan dunia internasional yang kompleks sifatnya, bersumberkan dari surat kabar, buletin dan majalah dalam dan luar negeri. Majalah ini merupakan salah satu sumber penulisan buku 'Indonesia dan Dunia Internasional' yang diterbitkan setiap tahun oleh CSIS



THE INDONESIAN QUARTERLY

majalah triwulanan, memuat karangan-karangan hasil pemikiran, penelitian, analisa dan penilaian yang bersangkutan paut dengan masalah-masalah aktual Indonesia di forum nasional maupun internasional



BUKU—BUKU

hasil penulisan staf CSIS baik mengenai strategi, ekonomi, ideologi, politik, hubungan internasional, pembangunan, hankam, sosial budaya dan lain-lain

CSIS juga menyediakan perpustakaan dan clippings yang terbuka untuk pencinta pengetahuan, analis dan peneliti dengan koleksi yang eksklusif, penyediaan data yang lengkap dan informasi yang cepat.

Penerbitan-penerbitan tersebut di atas dapat diperoleh di Toko-toko Buku, atau langsung pada :

CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES

Biro Publikasi

Jl. Tanah Abang III/27, Jakarta Pusat

Telpon : 356532 - 35